

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR





BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat diselesaikan tepat waktu.

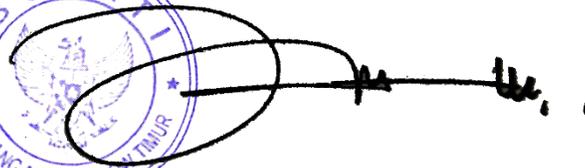
Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif merupakan sarana pelaporan dalam rangka mengimplementasikan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ini mengacu pada indikator-indikator yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026 yang berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat mengetahui tentang kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Semoga dengan selesainya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2023 ini, dapat bermanfaat dan dijadikan parameter untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat menuju Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang aman, berbudaya dan sejahtera melalui sinergitas pembangunan perdesaan.

Tutuyan, Maret 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,



SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos., M.Si.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*) melalui perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dimulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 disusun, dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026 yang secara umum menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta beberapa hal yang perlu perbaikan. Keberlangsungan perencanaan pembangunan sasaran strategis dan parameter yang digunakan berdasarkan sasaran tercermin dalam capaian indikator kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026.

Dengan penetapan sasaran dan indikator tersebut hal yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi dan misi dirumuskan secara lebih spesifik, terukur, berorientasi hasil, dapat dipercaya dan memiliki kurun waktu sehingga dengan penetapan sasaran tersebut diharapkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021 – 2026 dapat dinilai keberhasilan maupun kegagalannya.

Dalam rangka mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dari program dan kegiatan serta indikator kinerja yang diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut digunakan parameter sebagai berikut:

Skala Pengukuran Kinerja

No	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1.	$\geq 91\%$	Kinerja Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Kinerja Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Kinerja Cukup
4.	$51\% \leq 65\%$	Kinerja Rendah
5.	$< 50\%$	Kinerja Sangat Rendah

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap 8 sasaran strategis tersebut, menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian sasaran strategis adalah 112,65 yang berarti capaian kinerja sangat tinggi dan dapat dikategorikan berhasil sehingga dengan capaian seperti itu Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berhasil dalam mewujudkan visi yang diembannya yaitu: **“TERWUJUDNYA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR YANG AMAN, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA MELALUI SINERGITAS PEMBANGUNAN PERDESAAN”**.

Secara garis besar pencapaian misi dan sasaran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO.	MISI	JUMLAH SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR	CAPAIAN (%)
1.	I	2	7	99,78
2.	II	1	3	129,12
3.	III	5	17	109,04
Jumlah	3	8	27	112,65

Dari hasil pengukuran kinerja yang tersaji pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari ke 3 Misi dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, capaian kinerja tahun 2023, terdapat 2 Misi yang rata-rata capaiannya melampaui target yaitu Misi 2 dan 3. Meskipun demikian, terdapat beberapa indikator sasaran yang tidak mencapai target 100%. Pada Misi 1, dari 2 sasaran dengan 7 target indikator sasaran yang ditetapkan, terdapat 2 indikator sasaran yang tidak mencapai target yaitu indikator reformasi birokrasi dan indikator indeks inovasi daerah. Pada Misi 2, dari 1 sasaran dengan 3 target indikator sasaran yang ditetapkan, terdapat 1 indikator sasaran yang tidak mencapai target yaitu persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan PDRB. Sedangkan pada Misi 3, dari 5 sasaran dengan 17 target indikator sasaran yang ditetapkan, terdapat 6 indikator sasaran yang realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu indikator persentase jumlah penduduk yang berakses air minum, indikator persentase rumah layak huni, indikator persentase angka kemiskinan, indikator rata-rata lama sekolah, indikator angka harapan hidup dan indikator indeks pemberdayaan gender. Keberhasilan dan kegagalan dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2021-2026 bukan terletak pada banyaknya program dan kegiatan serta tersedianya dana dan juga Sumber Daya Manusia dalam jumlah besar, tetapi bagaimana mengelola program, kegiatan, anggaran, dan SDM yang mendukung pencapaian sasaran secara efektif dan efisien, serta dapat mengalokasikan anggaran program yang dianggap tidak perlu ke program yang menunjang sasaran kinerja, sehingga anggaran dapat difokuskan pada pencapaian sasaran yang diprioritaskan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	2
C. Gambaran Umum	2
D. Kondisi Pemerintahan.....	8
E. Besaran Organisasi Perangkat Daerah.....	15
F. Mandat Yang Diberikan Kepada Instansi.....	18
G. Kekuatan Sumberdaya Yang Ada.....	18
H. Isu Strategis	19
I. Sistematis Pelaporan.....	23
J. Lampiran - Lampiran	23
BAB II. PERENCAAN KINERJA.....	24
A. Rencana Strategis	24
B. Visi Misi.....	24
C. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.....	26
Tahun 2021-2026	27
D. Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	28
E. Indikator Kinerja Utama	28
F. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	31
G. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022	33

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	35
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	35
B. Realisasi Anggaran.....	108
BAB IV. PENUTUPAN.....	111
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
Lampiran 3. Pengukuran Kinerja Tahun 2023	
Lampiran 4. Pernyataan Reviu Inspektorat	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Kecamatan Menurut Luas dan Jumlah Desa	3
Tabel I.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	11
Tabel I.3 Kelembagaan Perangkat Daerah	17
Tabel I.4 Sumberdaya Pegawai.....	26
Tabel II.1 Tujuan Dan Sasaran Berdasarkan Misi RPJMD	27
Tabel II.2 Target Capaian Indikator Sasaran Yang Di Tetapkan Dalam RPJMD 2021-2026	29
Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Kab. Bolaang Mongondow Timur Tahun 2023	32
Tabel II.4 Rencana Pendapatan Belanja Kabupaten Bolaang Mongondow Timur TA 2023	33
Tabel III.1 Skala Pengukuran Kinerja.....	35
Tabel III.2 LPPD	36
Tabel III.3 Program dan Anggaran pendukung Sasaran 1	36
Tabel III.4 Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran Dan SDM	37
Tabel III.5 Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2023	39
Tabel III.6 Perkembangan Nilai SAKIP Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	39
Tabel III.7 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023.....	42
Tabel III.8 Perkembangan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	43
Tabel III.9 Opini BPK atas Laporan Keuangan	45
Tabel III.10 Maturitas SPIP Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019 - 2023	47
Tabel III.11 Evaluasi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2019-2023	48

Tabel III.12 Skor dan Kategori Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023	49
Tabel III.13 Data Indeks Inovasi Daerah Tahun 2019-2023	50
Tabel III.14 Program dan Anggaran pendukung Sasaran 2	51
Tabel III.15 Capaian Kinerja Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	52
Tabel III.16 Presentase deteksi dini konflik SARA yang diselesaikan Tahun 2019-2023	53
Tabel III.17 PDRB	55
Tabel III.18 Program dan Anggaran pendukung Sasaran 3	55
Tabel III.19 Capaian Kinerja Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kunjungan Wisata	56
Tabel III.20 Realisasi Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan PDRB Tahun 2019-2023	57
Tabel III.21 Tempat Wisata Terdaftar di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	58
Tabel III.22 Objek Wisata Menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	58
Tabel III.23 Realisasi Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2020-2023	62
Tabel III.24 Data Penopang Sektor Perdagangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	62
Tabel III.25 Realisasi Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB Tahun 2020-2023	64
Tabel III.26 IPM	66
Tabel III.27 Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 4	66
Tabel III.28 Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	67
Tabel III.29 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2019-2023.....	72
Tabel III.30 Daftar Pembangunan Jalan Tahun 2023.....	68
Tabel III.31 Persentase Jumlah Penduduk Yang Berakses Air Minum Tahun 2019-2023	71

Tabel III.32 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2019-2023	73
Tabel III.33 Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman.....	73
Tabel III.34 Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2019-2023	75
Tabel III.35 Persentase Terbentuknya Desa Tangguh Bencana Tahun 2019-2023 .	77
Tabel III.36 Status Desa.....	80
Tabel III.37 Persentase Desa Maju dan Mandiri Tahun 2019-2023	80
Tabel III.38 Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 5	81
Tabel III.39 Capaian Kinerja Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	82
Tabel III.40 Pertumbuhan Ekonomi	83
Tabel III.41 Indeks Gini Ratio Kab. Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019-2023.	85
Tabel III.42 Tingkat Pengangguran Terbuka	88
Tabel III. 43 Presentase Angka Kemiskinan.....	91
Tabel III.44 Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 6	92
Tabel III.45 Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.....	93
Tabel III.46 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019-2023	94
Tabel III.47 Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 7	95
Tabel III.48 Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Kesehatan Dan Pendidikan Masyarakat.....	96
Tabel III.49 Prevalensi Stunting Kab. Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019 - 2023	97
Tabel III.50 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) di Kab. Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019-2023	99
Tabel III.51 Harapan Lama Sekolah (Tahun) di Kab. Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019-2023.....	101
Tabel III.52 Angka Harapan Hidup (Tahun) di Kab. Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019-2023	102
Tabel III.53 Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 8	104

Tabel III.55 Indeks Pembangunan Gender di Kab. Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019-2023 105

Tabel III.56 Indeks Pemberdayaan Gender di Kab. Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019-2023 107

Tabel III.57 Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Per Sasaran Strategis Tahun 2023..... 108

Tabel III.58 Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 109

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel salah satunya dengan penguatan akuntabilitas kinerja. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati /Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten / Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2023 ini disusun sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026.

C. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

1. Kondisi Geografis

Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara.

Secara geografis, wilayah Kabupaten bolaang Mongondow Timur memiliki Luas wilayah ± 866,372 Km² atau ± 65,97% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Utara yaitu 14.500,275 Km².

Batas-batas wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Maluku dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku.

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terdiri dari 81 Desa yang tersebar di 7 (tujuh) Wilayah Kecamatan. Kecamatan Modayag adalah kecamatan terluas, dengan luas $\pm 190,061 \text{ Km}^2$ dan Kecamatan dengan Luas terkecil adalah Kecamatan Modayag Barat dengan luas $\pm 37,425 \text{ Km}^2$, yang selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.1:

Tabel I.1
Jumlah Kecamatan Menurut Luas dan Jumlah Desa
di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	(%)	Jumlah Desa
1	Tutuyan	156,300	18,04	10
2	Kotabunan	133,827	15,44	15
3	Motongkad	122,667	14,15	11
4	Nuangan	133,814	15,44	11
5	Modayag	190,061	21,93	14
6	Modayag Barat	37,425	4,31	10
7	Mooat	92,278	10,65	10
	Jumlah	866,372	100,00	81

Sumber: Bapelitbangda 2023

Letak astronomis Kabupaten Bolaang Mongondow Timur secara detail berada diantara $0^{\circ} 27' 59,69''$ - $0^{\circ} 57' 24,47''$ Lintang Utara dan $124^{\circ} 20' 6,32''$ - $124^{\circ} 41' 55,89''$ Bujur Timur. Sesuai dengan letak astronomi, Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur berada dalam wilayah waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA).

Wilayah Bolaang Mongondow Timur memiliki dua kawasan yang dominan, yaitu kawasan Pesisir dan Pegunungan. Kawasan pesisir meliputi Kecamatan Kotabunan, Tutuyan, Motongkad dan Nuangan. Memiliki karakteristik pesisir dan laut yang berpotensi untuk agribisnis/agroindustri, wisata bahari, wisata tirta dan wisata aerosport, komoditas kelapa, cengkeh, kakao, pala, padi sawah dan jagung. Selain itu kawasan pesisir juga memiliki potensi sumberdaya mineral emas, batuan dan batu gamping sebagai bahan baku industry semen.

Kawasan pegunungan Bolaang Mongondow Timur Meliputi Kecamatan Mooat, Modayag dan Modayag Barat. Memiliki karakteristik pegunungan dengan potensi komoditas pertanian hortikultura, perkebunan kopi (Arabica) dan komoditas ikan sidat (sogili). Selain itu wilayah ini juga memiliki potensi wisata tirta, wisata agro, wanawisata, geowisata dan aerowisata serta potensi sumberdaya emas, batuan dan panas bumi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

2. Potensi Pengembangan Wilayah

Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai dengan Tahun 2023, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Untuk peningkatan pemanfaatan tata ruang Peraturan Daerah tersebut masih dalam tahapan revisi. Dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2013-2033, arahan pemanfaatan ruang sebagai berikut:

1. Kecamatan Kotabunan merupakan Kawasan Perdagangan dan Jasa.
2. Kecamatan Tutuyan merupakan Kawasan Pusat Pemerintahan dan Pemukiman.

3. Kecamatan Nuangan dan Kecamatan Motongkad merupakan Kawasan Kelautan dan Perikanan (Minapolitan).
4. Kecamatan Modayag, Kecamatan Modayag Barat dan Kecamatan Mooat merupakan Kawasan Agropolitan.

Secara umum pengembangan wilayah kabupaten Bolaang Mongondow timur memiliki karakteristik pesisir dan pegunungan. Wilayah pesisir yang meliputi Kecamatan Kotabunan, Tutuyan, Motongkad, dan Nuangan memiliki karakteristik pesisir dan laut dengan potensi yaitu kelautan dan perikanan serta agribisnis/agroindustri, wisata bahari dan wisata tirta dan wisata aerosport, dan komoditas kelapa, cengkeh, kakao, dan pala serta padi sawah dan jagung. Demikian juga potensi sumberdaya mineral emas, batuan dan mineral ikutan lainnya serta batu gamping sebagai bahan baku industri semen. Wilayah pesisir dan laut serta potensinya dikenal dengan Koridor Pesisir.

Wilayah pegunungan yang meliputi Kecamatan Mooat, Modayag, Modayag Barat memiliki karakteristik pegunungan dengan potensi yaitu komoditas pertanian hortikultura, komoditas perkebunan kopi (Arabica) dan komoditas ikan sidat (*sogili*). Selain itu memiliki potensi wisata tirta, wisata agro, wanawisata, geowisata dan aerowisata. Demikian juga potensi sumberdaya panasbumi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Wilayah Pegunungan dan potensinya dikenal dengan Koridor Pegunungan.

Berdasarkan deskripsi karakter wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi yang dikembangkan sebagai berikut:

- Kawasan Budidaya Perikanan
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar, berupa perikanan tangkap di perairan umum (danau, sungai dan rawa) dan laut serta perikanan budidaya yaitu budidaya air tawar (*Freshwater Aquaculture*), budidaya air payau (*Brackishwater Aquaculture*), dan budidaya laut (*Mariculture*). Produksi perikanan darat berasal dari penangkapan di sungai dan danau serta

budidaya tambak. Kawasan yang secara teknis sesuai untuk pengembangan budidaya perikanan air tawar air dan laut terdiri atas:

- Budidaya air payau di wilayah Kecamatan Nuangan;
- Budidaya air tawar di wilayah Kecamatan Modayag (Danau Mooat); Sungai Buyat (Kecamatan Kotabunan); dan Sungai Tutuyan (Kecamatan Tutuyan);
- Budidaya laut di wilayah Kecamatan Nuangan.

Untuk mendukung aktivitas perikanan di wilayah kabupaten maka ditetapkan kawasan Minapolitan yang meliputi wilayah Kecamatan Nuangan, yang akan dilengkapi dengan sarana Tempat Pendaratan Ikan (TPI) dan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) dan Sentra Pengolahan Hasil Ikan.

Untuk mendukung keberlanjutan ekosistem kelautan di wilayah kabupaten maka ditetapkan kawasan konservasi yang terdiri atas:

- Kawasan konservasi mangrove di seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - Kawasan konservasi terumbu karang dan lamun di seluruh wilayah perairan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Kawasan Budidaya Pertanian
 - Kawasan Budidaya Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terdiri dari:
 1. Kawasan tanaman pangan berupa lahan sawah yang terdapat di:
 - Kecamatan Tutuyan dengan luas \pm 157,052 Ha,
 - Kecamatan Kotabunan dengan luas \pm 117,398 Ha,
 - Kecamatan Nuangan dengan luas \pm 48,766 Ha,
 - Kecamatan Motongkad dengan luas \pm 82,054 Ha,
 - Kecamatan Modayag dengan luas \pm 57,788 Ha, dan
 - Kecamatan Modayag Barat dengan luas \pm 304,764 Ha;
 - Kecamatan Mooat dengan luas \pm 14,315 ha.

2. Kawasan hortikultura yang terdapat di Kecamatan Kotabunan, Kecamatan Modayag, Kecamatan Modayag Barat dan Kecamatan Mooat.
 3. Kawasan perkebunan yang meliputi:
 - a. Kawasan peruntukan perkebunan Kelapa, tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
 - b. Kawasan peruntukan perkebunan Kakao tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
 - c. Kawasan peruntukan perkebunan Cengkih tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
 - d. Kawasan peruntukan perkebunan Kopi Robusta terdapat di Kecamatan Modayag, dan Kecamatan Modayag Barat.
 - e. Kawasan peruntukan perkebunan Aren, Kemiri, Pala, Lada, Cassiavera, dikembangkan dan tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Kawasan Budidaya Pariwisata

Kawasan budidaya pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terdiri dari:

 - Kawasan peruntukan wisata alam/wisata bahari; yang terletak di wilayah pesisir Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kawasan Pulau Racun, Pulau Kumeke, Pulau Nanas/Bombuyanoi, Pulau Ibantong, Pulau Laga Besar, Pulau Laga Kecil, Pulau Ponogaguan, Pulau Tanjung Merah dan Pulau Lampu, kawasan pegunungan, kawasan air terjun, dan air panas di kawasan Gunung Ambang yang ada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
 - Kawasan peruntukan wisata budaya; adalah wisata adat yang tersebar di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - Kawasan peruntukan wisata buatan adalah wisata buatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Sektor pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada umumnya belum dikelola secara profesional, tetapi jika dilihat dari jumlah

dan jenis obyeknya ternyata terdapat beberapa lokasi yang sangat potensial untuk dikembangkan lebih lanjut.

- Kawasan Budidaya Pertambangan

Kawasan budidaya pertambangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur meliputi kawasan peruntukan pertambangan mineral logam yang terdapat di Kecamatan Kotabunan dengan luas \pm 3.995,565 ha dan di Kecamatan Modayag dengan luas \pm 7.850,289 ha dan kawasan pertambangan batuan lainnya yang tersebar di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

D. KONDISI PEMERINTAHAN

1. KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, TUGAS DAN WEWENANG BUPATI

a. Kedudukan.

Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Bupati melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan Kebijakan Daerah. Bupati dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

b. Kewajiban.

Bupati dan Wakil Bupati memiliki kewajiban sebagai berikut:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- 4) Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;

- 5) Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- 6) Melaksanakan program strategis nasional; dan
- 7) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.
- 8) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah, laporan keterangan pertanggung jawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

c. Tugas dan Wewenang.

Tugas dan Wewenang Bupati sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 adalah sebagai berikut:

Kepala Daerah mempunyai tugas:

- 1) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- 2) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 3) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- 5) Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Mengusulkan pengangkatan Wakil Kepala Daerah; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Daerah berwenang:

- 1) Mengajukan rancangan Perda;
- 2) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- 3) Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- 4) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- 5) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas:

- 1) Membantu kepala daerah dalam:
- 2) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- 3) Mengkoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindak lanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
- 4) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, dan/atau Desa bagi wakil bupati;
- 5) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- 6) Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;

- 9) Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati.

2. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah sebagai berikut:

Tabel I.2
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kedudukan	Tugas	Fungsi
Sekretariat Daerah		
Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.	Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah; 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; 4. Pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Sekretariat DPRD		
Sekretariat DPRD merupakan unsure pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kabupaten; 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan

<p>kabupaten, yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD Kabupaten dan secara administrative bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.</p>	<p>fungsi DPRD Kabupaten, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.</p>	<p>DPRD Kabupaten;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD Kabupaten; dan 4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten.
Inspektorat		
<p>Inspektorat Daerah merupakan unsure pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah</p>	<p>Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati; 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; 5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati

		terkait dengan tugas dan fungsinya.
Dinas Daerah		
Dinas Daerah merupakan unsure pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh kepala dinas daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah	Dinas daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; 4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
Badan Daerah		
Badan Daerah merupakan unsure penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Badan, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah	Badan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

		sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
Kecamatan		
Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa atau sebutan lain dan Kelurahan yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum; 2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau 	

	<p>sebutan lain dan/atau Kelurahan;</p> <p>8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan</p> <p>9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>10. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan</p>	
--	---	--

E. BESARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan hasil pemetaan sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah - Tipe A
2. Sekretariat DPRD - Tipe C
3. Inspektorat Daerah- Tipe B
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Tipe A
5. Dinas Pemuda dan Olahraga - Tipe B
6. Dinas Pariwisata - Tipe B
7. Dinas Kesehatan -Tipe A
8. Dinas Sosial-Tipe A
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Tipe B
10. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Tipe C
11. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja - Tipe A
12. Dinas Komunikasi dan Informatika - Tipe B
13. Dinas Perhubungan - Tipe C
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B
15. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B
16. Dinas Pertanian - Tipe B
17. Dinas Perikanan - Tipe A
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Tipe C
19. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Tipe C
20. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Tipe B
21. Dinas Lingkungan Hidup – Tipe C
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Tipe B
23. Dinas Ketahanan Pangan - Tipe A
24. Dinas Perpustakaan Daerah - Tipe C

25. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran - Tipe B
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A
27. Badan Riset dan Inovasi Daerah
28. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah - Tipe A
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - Tipe C
30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
31. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
32. Kecamatan Modayag - Tipe A
33. Kecamatan Modayag Barat - Tipe A
34. Kecamatan Kotabunan - Tipe A
35. Kecamatan Nuangan - Tipe A
36. Kecamatan Tutuyan - Tipe A
37. Kecamatan Mooat - Tipe A
38. Kecamatan Motongkad - Tipe A

Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel I.3
Kelembagaan Perangkat Daerah

No.	Perangkat Daerah	2022	2023	Keterangan
1.	Sekretariat Daerah	1	1	Tetap
2.	Sekretariat DPRD	1	1	Tetap
3.	Inspektorat Daerah	1	1	Tetap
4.	Dinas Daerah	21	22	Bertambah
5.	Badan Daerah	5	6	Bertambah
6.	Kecamatan	7	7	Tetap
	Jumlah	36	38	

Dapat dilihat dari tabel diatas, jumlah perangkat daerah di tahun 2023 bertambah 2 perangkat daerah.

F. MANDAT YANG DIBERIKAN KEPADA INSTANSI.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan mandat kepada Pemerintah Kabupaten pada pasal 209 yang menyebutkan bahwa :

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan.
- (2) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerahnya.
- (3) Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh yang menugasi.
- (4) Dokumen anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian rancangan APBD dalam dokumen yang terpisah.
- (5) Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.

G. KEKUATAN SUMBERDAYA YANG ADA

Sumber Daya Pegawai Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

- a. Jumlah Aparatur Sipil Negara menurut golongan :

Tabel I.4
Sumberdaya Pegawai

No	Golongan	Jumlah	%
1	IV	249 Orang	11,81
2	III	1410 Orang	69,38
3	II	350 Orang	18,71

4	I	2 Orang	0,10
	Total	2100 Orang	100

Sumber Data : BKPSDM Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

- b. Jumlah Jabatan yang Terisi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menurut Eselon pada Tahun 2023 :

ESELON IIA	= 1
ESELON IIB	= 36
ESELON IIIA	= 53
ESELON IIIB	= 96
ESELON IVA	= 116
ESELON IVB	= 21

- c. Jumlah Klasifikasi Pendidikan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2023 :

S3	= 1
S2	= 50
S1/D4	= 1600
D3	= 468
D2	= 44
D1	= 8
SLTA	= 232
SD	= 3

H. ISU STRATEGIS

Isu strategis pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026 adalah:

1. Isu Strategis Tata Kelola Pemerintahan;
 - a) Pemantapan reformasi birokrasi yang diarahkan pada upaya-upaya peningkatan kualitas aparatur dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa;

- b) Peningkatan efisiensi, efektifitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik;
 - c) Optimaliasi pengelolaan keuangan dan asset daerah
 - d) Penguatan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), dan percepatan pencapaian SPM bidang penataan ruang meliputi informasi pemanfaatan ruang, keterlibatan masyarakat dalam penataan ruang, perizinan pemanfaatan ruang, pengaduan tata ruang dan rung terbuka hijau;
 - e) Pemantapan kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien dan sinergis;
 - f) Peningkatan akses informasi public yang akurat dan up to date dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan publik;
 - g) Peningkatan Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan bersinergi serta konsistensi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
 - h) Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat;
 - i) Peningkatan pemeliharaan Keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dengan pencegahan tindak criminal serta penegakan peraturan daerah;
 - j) Peningkatan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah Desa;
 - k) Peningkatan pengelolaan dan pengembangan potensi-potensi sumber-sumber PAD;
 - l) Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah.
2. Isu Strategis Kepariwisataaan;
- a) Pengembangan sector ekonomi produktif bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan penguatan kelembagaan kepariwisataan;
 - b) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;
 - c) Pengembangan kewirausahaan dan unggulan kompetitif UKM
 - d) Pengembangan Industri kecil dan menengah;

- e) Pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan;
 - f) Peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
 - g) Peningkatan sarana pengelolaan pariwisata;
 - h) Pengembangan pemasaran pariwisata;
 - i) Pengembangan destinasi Pariwisata, pengelolaan keragaman budaya;
 - j) Pengembangan nilai budaya dan pengelolaan kekayaan budaya;
 - k) Pengembangan Agrowisata dan Perikanan.
3. Isu Strategis Pelayanan Dasar Masyarakat.
- a) Penurunan angka *Pravelensi Stunting*;
 - b) Peningkatan akses pelayanan kesehatan Dasar dan rujukan yang berkualitas;
 - c) Percepatan pembangunan sanitasi dan air bersih dalam rangka pencapaian akses 100%;
 - d) Peningkatan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender;
 - e) Peningkatan Pemenuhan hak pendidikan masyarakat yang berkualitas mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi;
 - f) Peningkatan pelaksanaan pemberdayaan pasangan usia subur melalui kursus serta mengadakan pembinaan terhadap keluarga rentan masalah;
 - g) Penerapan P3MB ke dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran;
 - h) Penanggulangan Kemiskinan;
 - i) Peningkatan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu;
 - j) Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pembangunan Daerah;
 - k) Peningkatan Penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - l) Peningkatan kualitas prestasi olah raga pemuda;
 - m) Pengembangan system penanggulangan bencana yang responsif, transparan, dan akuntabel;
 - n) Peningkatan kepesertaan Masyarakat dalam BPJS.
4. Isu Strategis Pembangunan Berwawasan Lingkungan:

- a) Penyediaan sarana dan Prasarana pengelolaan persampahan;
- b) Penerapan teknologi tepat guna dimasyarakat dan pemberdayaan kelompok;
- c) Peningkatan produksi dan produktifitas komoditas unggulan daerah;
- d) Peningkatan penanganan pasca panen hasil pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan kelautan;
- e) Peningkatan pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan;
- f) Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
- g) Peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman pangan;
- h) Peningkatan kapasitas informasi dan teknologi sistem produksi;
- i) Pengembangan sentra-sentra Industri Potensial dan penataan struktur Industri;
- j) Pemeliharaan, peningkatan dan perbaikan jalan, jembatan dan bangunan pelengkap ruas jalan kabupaten, kecamatan dan poros desa yang menuju kawasan wisata, daerah potensi ekonomi strategis dan daerah perbatasan;
- k) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang meliputi sarana prasarana jaringan irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan irigasi dan peningkatan SDM;
- l) Pembangunan infrastruktur pedesaan;
- m) Peningkatan iklim investasi dan pengembangan ekonomi lokal;
- n) Peningkatan penciptaan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif;
- o) Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;
- p) Penyiapan potensi sumber daya sarana dan prasarana;
- q) Pengembangan RTH dala mendukung program kota di kawasan perkotaan Tutuyan;
- r) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan perlindungan serta konservasi sumberdaya alam;
- s) Pengendalian kebakaran Hutan;

- t) Pemanfaatan SDA yang ramah lingkungan;
- u) Pengawasan dan penertiban kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan;
- v) Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat terkait kebencanaan;
- w) Pencegahan dan mitigasi bencana serta tanggap darurat bencana.

I. SISTEMATIKA PELAPORAN

- a. Kata Pengantar
- b. Ikhtisar Eksekutif
- c. Daftar Isi
- d. Bab I Pendahuluan
- e. Bab II Perencanaan Kinerja
- f. Bab III Akuntabilitas Kinerja
- g. Bab IV Penutup

J. LAMPIRAN - LAMPIRAN

- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- 2) Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- 3) Pengukuran Kinerja Tahun 2023
- 4) Pernyataan Reviu Inspektorat

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang dilaksanakan melalui program kebijakan Kepala Daerah. Rencana Strategis dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Secara sistematis Rencana Strategis mengedepankan isu – isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.

B. VISI DAN MISI

- **VISI**

Berdasarkan kondisi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan isu strategis yang dihadapi, maka pasangan **SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos.,M.Si** (Bupati) - **OSKAR MANOPPO,SE.,MM** (Wakil Bupati) membuat Visi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR YANG
AMAN, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA MELALUI SINERGITAS
PEMBANGUNAN PERDESAAN.”**

Makna dan pengertian dari visi sebagaimana dimaksud, dijabarkan dalam penjelasan sebagai berikut:

1. KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR YANG AMAN

Makna dan pengertian dari AMAN yakni: Kemampuan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, toleransi antar umat beragama serta kenyamanan hidup komunitas.

2. KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR BERBUDAYA

- a) Kemampuan masyarakat menjaga keragaman dan kekayaan budaya daerah yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- b) Kemampuan membangun jati diri dan karakter bangsa melalui revolusi mental dalam penyelenggaraan hidup bermasyarakat dan bernegara.
- c) Kemampuan membangun dan menjaga warisan tradisi budaya daerah Bolaang Mongondow Timur sebagai bentuk kearifan lokal dan penghargaan terhadap jati diri masyarakat.

3. KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR SEJAHTERA

Adanya keseimbangan dan kesetaraan dalam semua aspek pembangunan akan menunjang ketahanan ekonomi wilayah yang disertai ketahanan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan berkelanjutan, menurunnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran serta penyandang masalah kesejahteraan sosial.

4. SINERGITAS PEMBANGUNAN DESA

Sinergitas pembangunan Desa merupakan keterpaduan dalam proses pembangunan yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai kunci utama yang dapat mewujudkan terselenggaranya pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) dengan memperhatikan potensi yang dimiliki oleh masing-masing Desa.

- **MISI**

Untuk mewujudkan Visi pasangan **SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos.,M.Si** (Bupati) - **OSKAR MANOPPO, SE.,MM** (Wakil Bupati) ditetapkan 3 (Tiga) Misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik.
- 2) Meningkatkan Budaya dan Pariwisata yang berkearifan lokal.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan.

C. TUJUAN dan SASARAN RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026.

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Selain itu pula, tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2021-2026, dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.1
Tujuan Dan Sasaran Berdasarkan Misi RPJMD
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Misi 1: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan SDM	SAKIP
		Reformasi Birokrasi
		Opini BPK
		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal

		Pemerintah (SPIP)
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
		Indeks Inovasi Daerah
	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	Persentase Deteksi Dini Konflik Sara Yang Diselesaikan
Misi 2: Meningkatkan Budaya Dan Pariwisata Yang Berkearifan Lokal		
Meningkatkan pengembangan kebudayaan dan daya tarik destinasi	Meningkatnya Kuantitas dan kualitas kunjungan wisata	Persentase Kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan PDRB
		Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
		Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB
Misi 3: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berwawasan Lingkungan		
Meningkatkan pelayanan wajib yang menyentuh langsung pada masyarakat	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
		Persentase Jumlah Penduduk Yang Berakses Air Minum
		Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
		Persentase Rumah Layak Huni
		Persentase Terbentuknya Desa Tangguh Bencana
		Indeks Desa Membangun
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi
		Indeks Gini Ratio
		Tingkat Pengangguran Terbuka
		Persentase Angka Kemiskinan
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		Prevalensi Stunting
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat	Rata - Rata Lama Sekolah
Angka Harapan Hidup		
Harapan Lama Sekolah		

	Meningkatkan Pelayanan Anak dan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

D. Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMD ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan strategi sebagai prioritas pembangunan (*strategy focused organization*) lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah. Pemerintah daerah telah menyusun strategi pembangunan sebagaimana telah digambarkan di atas sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan. Terdapat 5 (lima) program unggulan, yaitu:

1. Peningkatan pendidikan untuk sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama.
3. Pemenuhan akses cakupan layanan air minum dan sanitasi layak.
4. Peningkatan kualitas lingkungan melalui penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
5. Pembangunan budaya dan pariwisata melalui pengembangan agrowisata, perikanan dan penguatan UMKM serta koperasi terutama di perdesaan.

E. Indikator Kinerja Utama.

Untuk mencapai target misi: “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Meningkatkan Budaya dan Pariwisata Yang Berkearifan Lokal, serta Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan”, maka ditetapkan target yang harus dicapai dalam Indikator Sasaran selama 5(lima) tahun Kepemimpinan **SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos.,M.Si** (Bupati) - **OSKAR MANOPPO, SE.,MM** (Wakil Bupati) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 7 tahun 2021 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dirumuskan dalam target indikator sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yang merupakan tolak ukur kinerja Pemerintah Daerah selama 5 (lima) tahun yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, serta rasional. Rumusan target-target dalam indikator sasaran dapat di lihat pada uraian Tabel berikut dibawah ini:

Tabel II. 2

Target Capaian Indikator Sasaran Yang Di Tetapkan Dalam RPJMD 2021-2026

Misi 1: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik							
Indikator Tujuan/ Sasaran	Tahun						Kondisi Akhir
	Target Awal 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026	
LPPD (Skor)	3,5	3,7	3,7	3,8	3,8	3,8	4
Sakip	B	B	B	A	A	A	A
Reformasi Birokrasi	CC	CC	B	A	A	A	A
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal (SPIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3+	Level 3+	Level 3+	Level 3+
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,80	2,00	2,40	3,50	3,50	3,50	3,50
Indeks Inovasi Daerah	Kurang Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
Persentase Deteksi Dini Konflik SARA Yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Misi 2: Meningkatkan Budaya Dan Pariwisata Yang Berkearifan Lokal							
PDRB Per Kapita	42,03	47,31	49,75	52,39	52,39	52,39	52,39

Persentase Kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan PDRB	3,5	3,5	4	4,5	4,5	4,5	4,5
Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	7,75	7,80	7,82	7,84	7,88	7,95	7,95
Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB	4,88	5,38	5,88	6,38	6,38	6,38	6,38
Misi 3: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berwawasan Lingkungan							
IPM	65,99	66,40	66,80	67,20	67,60	68,00	68,00
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	0,48	0,48	0,50	0,53	0,55	0,57	0,57
Persentase Jumlah Penduduk Yang Berakses Air Minum	72,09	73,09	74,29	75,08	75,42	76,35	76,35
Persentase Rumah Tinggal Bersantasi	59,8	59,8	60,16	60,46	60,71	60,91	60,91
Persentase Rumah Layak Huni	85,30	85,30	85,86	86,42	87,13	87,83	87,83
Persentase Terbentuknya Desa Tangguh	0	2	2	2	2	2	10

Bencana							
Indeks Desa Membangun	16,5	49,38	56,79	72,84	79,01	90,12	90,12
Pertumbuhan Ekonomi	3%	3%	3,18	4%	4,50%	5%	5%
Indeks Gini Ratio	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,13	6,1	6	6	6	6	6
Persentase Angka Kemiskinan	5,8	5,6	5,6	5,6	5,6	5,4	5,4
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,88	67,88	68,29	68,70	68,70	68,70	68,70
Prevalensi Stunting	6,53	6	6	6	6	6	6
Rata - Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,90	9,90	10,90	12,00	12,00	12,00	12,00
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,59	11,61	11,63	11,65	11,67	11,69	11,69
Angka Harapan Hidup (Tahun)	67,89	68,89	69,89	70,00	70,00	70,00	70,00
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,84	90,90	90,95	91,00	91,00	91,00	91,00
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,06	74,00	76,00	78,00	78,00	78,00	78,00

F. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel II. 3
Perjanjian Kinerja Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA

KABUPATEN : BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN : 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan SDM	SAKIP	B
	Reformasi Birokrasi	B
	Opini BPK	WTP
	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Level 3
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,40
	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif
Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	Persentase Deteksi Dini Konflik SARA yang diselesaikan	100 %
Meningkatnya Kuantitas dan kualitas kunjungan wisata	Persentase Kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan PDRB	4
	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	7,82
	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB	5,88
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	0,50
	Persentase Jumlah Penduduk Yang Berakses Air Minum	74,29
	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	60,16
	Persentase Rumah Layak Huni	85,86
	Persentase Terbentuknya Desa Tangguh Bencana	2 Desa (40%)
	Indeks Desa Membangun	56,79
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	3,18%
	Indeks Gini Ratio	0,34
	Tingkat Pengangguran Terbuka	6
	Persentase Angka Kemiskinan	5,6
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,29
Meningkatnya Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat	Prevalensi Stunting	6
	Rata - Rata Lama Sekolah (Tahun)	10,90

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,63
	Angka Harapan Hidup (Tahun)	69,89
Meningkatkan Pelayanan Anak dan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,95
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76,00

G. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 4
Rencana Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)
Pendapatan	545.196.618.255,
Belanja	491.359.703.372

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah merupakan wujud dari pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana kerja tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah juga menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Visi dan Misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Kepala Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan masyarakat yang sejahtera.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pencapaian kinerja diukur dengan mengacu pada hasil capaian indikator hasil (*outcome*).

Capaian Kinerja Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dilihat berdasarkan hasil analisis akuntabilitas kinerja. Hasil capaian kinerja tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun secara sistematis guna mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, kemudian dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan pembangunan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel III.1
Skala Pengukuran Kinerja

No	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1.	$\geq 91\%$	Kinerja Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Kinerja Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Kinerja Cukup
4.	$51\% \leq 65\%$	Kinerja Rendah
5.	$< 50\%$	Kinerja Sangat Rendah

Tingkat capaian kinerja Laporan Kinerja Instansi pemerintah dapat dilihat pada pencapaian, setiap misi, sasaran dan indikator sebagai berikut:

MISI 1 : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**Tujuan****Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik****Sasaran 1*****Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran Dan SDM***

- LPPD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020-2023

Tabel III.2
LPPD

KETERANGAN	TAHUN			
	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
INDIKATOR TUJUAN				
LPPD	-	2,26	2,46	Sementara Penyusunan

Sumber Data : Bagian Pemerintahan 2024

Untuk mencapai Target Realisasi Sasaran 1 (Satu) “ Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan SDM”, telah ditetapkan Program-program dan Anggaran Sebagai berikut:

Tabel III.3
Program dan Anggaran pendukung Sasaran 1 (Satu);” Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan SDM”

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	122.909.901
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	449.533.521
3.	Program Kepegawaian Daerah	347.418.352
4.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.953.991.459
5.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	208,853,663
6.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2,468,921,943
7.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	287.871.621
8.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.208.802.070
9.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	250.532.000
10.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	719.826.978
11.	Program Aplikasi Informatika	1.127.003.441
12.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	646.531.716
	Total	9.792.196.665

Untuk mengetahui hasil pencapaian sasaran 1 (Satu) maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menetapkan 6 (Enam) Indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel III.4
Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran Dan SDM

No	Indikator Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023			Target Tahun 2026 (Akhir RPJMD)
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target
1.	SAKIP	B	B	100	B	B	100	A
2.	Reformasi Birokrasi	CC	C	99,64	B	CC	97,15	A
3	Opini BPK	WTP	WTP	100	WTP	WTP*	100	WTP
4.	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 2	75,67	Level 3	Level 3	100	Level 3+
5.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,00	2,04	102	2,40	2,46	102,50	3,50
6.	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Kurang Inovatif	64	Inovatif	Kurang Inovatif	97,71	Sangat Inovatif

Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan SDM dengan 6 Indikator sasaran pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. SAKIP

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan Evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah:

1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2023 adalah 66,42 dengan predikat “B”. hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik” yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen. Jika dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2023 adalah B

maka capaian kinerja tercapai 100% (capaian kinerja sangat tinggi). Rincian hasil evaluasi AKIP Kabupaten Bolaang Mongondow Timur:

Tabel III.5
Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Tahun 2023

	Komponen yang Dinilai	BOBOT	NILAI
			2023
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,90
b.	Pengukuran Kinerja	30	17,17
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,67
d.	Evaluasi Internal	25	16,68
	Nilai Hasil Evaluasi	100	66,42
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Perkembangan predikat SAKIP Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.6
Perkembangan Nilai SAKIP Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Sakip	B	B	B	B	B

Sumber Data : Bagian Organisasi Kabupaten Boltim

Jika dilihat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, nilai SAKIP Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selalu mencapai target yang diperjanjikan yaitu B. Namun jika dibandingkan dengan target RPJMD tentu masi perlu dilakukan perbaikan untuk dapat mencapai target RPJMD yaitu A. Beberapa rekomendasi yang perlu disempurnakan dalam rangka peningkatan Nilai SAKIP Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu:

- a. Memastikan sasaran kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan telah selaras dari perencanaan jangka menengah (lima tahunan) hingga perencanaan jangka pendek (tahunan);
- b. Mereviu kembali perencanaan kinerja pada seluruh unit kerja untuk dapat merumuskan sasaran strategisnya lebih berorientasi outcome pada level kinerjanya dan juga memastikan indikator kinerja yang dimiliki dapat

- relevan, cukup untuk mengukur ketercapaian kinerja, dan memberikan continuous improvement pada pencapaian kinerja yang ditetapkan;
- c. Menyempurnakan rencana aksi tingkat pusat dan perangkat daerah dengan menyajikan informasi tidak hanya terfokus pada penggunaan anggaran, tetapi juga tahapan kegiatan dan target periodik;
 - d. Menyempurnakan proses penjabaran kinerja dengan memperbaiki kerangka logis yang mendasarinya sehingga dapat menghasilkan alternative solusi yang mampu memecahkan masalah pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam melakukan pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja berjenjang untuk dijadikan sebagai dasar pemberian reward and punishment dan juga sebagai bukti tumbuhnya budaya kinerja yang baik;
 - g. Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan memberikan solusi yang efektif yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap Perangkat Daerah;
 - h. Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi AKIP internal yang sudah dilakukan sebagai bagian dari penilaian reward dan punishment kepala Perangkat Daerah

Berdasarkan catatan-catatan diatas, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melakukan upaya-upaya peningkatan nilai Evaluasi SAKIP dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan penyelarasan pada dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahunan) dengan perencanaan jangka pendek (tahunan);
- b. Merumuskan kembali indikator kinerja baik pada level pemda maupun perangkat daerah;
- c. Memperbaiki kualitas dokumen rencana aksi;
- d. Merencanakan untuk pengukuran kinerja menggunakan aplikasi *E-Kinerja*;

- e. Memperbaiki dokumen dan menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP internal
- f. Bupati Bolaang Mongondow Timur melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah untuk meningkatkan pencapaian kinerja.

Indikator SAKIP didukung oleh program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan total anggaran Rp. 572.443.422 dan terealisasi Rp. 526.686.130 atau 92,01% sehingga ada penghematan sebesar 7,99%. Selain dari segi anggaran terjadi efisiensi dari sumber daya manusia karena dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten dan dengan jumlah yang terbatas.

2. REFORMASI BIROKRASI

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Road Map 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Tim Penilai Nasional (TPN) telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada reformasi birokrasi berdampak dan kolaboratif. Tujuan evaluasi untuk menilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(RB) dalam rangka mencapai sasaran terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, linca, dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang professional. Selain itu evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas RB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2023 adalah **58,39** dengan kategori **“CC”** dengan persentase capaian **97,15% (kinerja sangat tinggi)**, capaian ini tidak sesuai dengan target yang diperjanjikan yaitu B (60,01). Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur disampaikan melalui Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor: B/567/RB.06/2024 Hal: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Rincian hasil evaluasi Indeks RB Tahun 2023 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai berikut:

Tabel III.7
Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2023

No	Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	48,99
B	RB Tematik	20	9,40
C	Indeks RB	120	58,39
			(CC)

Dapat dilihat dari hasil evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 bahwa nilai RB General Bolaang Mongondow Timur dari bobot 100 diperoleh nilai 48,99 yang artinya capaian indikator pada 21 kegiatan RB General masih perlu ditingkatkan karena terdapat beberapa indikator dengan capaian rendah. Selanjutnya untuk RB Tematik Bolaang Mongondow Timur mendapat nilai 9,40 dari bobot nilai 20. Penilaian RB Tematik ini meliputi pengentasan kemiskinan, realisasi investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan fokus pada penanganan stunting, penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflrasi.

Perkembangan realisasi hasil evaluasi reformasi birokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dari tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel III.8
Perkembangan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Evaluasi RB	C	C	C	C	CC

Sumber Data : Bagian Organisasi Kabupaten Boltim

Data diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2019 yang merupakan tahun awal penilain Indeks RB untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai dengan tahun 2023 belum mencapai target yang diperjanjikan namun terjadi peningkatan predikat dari C menjadi CC. Jika dilihat dari target yang diperjanjikan yaitu B (60,01) maka Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan predikat CC (58,39) sudah mendekati target yang diperjanjikan. Target pencapaiannya di akhir RPJMD kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tahun 2026 yaitu A sehingga perlu peningkatan kinerja untuk mencapai target RPJMD. Untuk mencapai target Indeks RB dan agar reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan beberapa catatan yang perlu diperbaiki oleh Kabupaten Bolaang Mongondow Timur:

- a. Memastikan rencana aksi relevan dan cukup untuk mencapai target sasaran kegiatan utama;
- b. Memperkuat Tim Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan capaian target indikator kegiatan utama;
- c. Meningkatkan pemahaman reformasi birokrasi dan budaya kerja kepada seluruh ASN.

Untuk mecapai target kinerja kedepan, maka perlu upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu:

- a. Memperbaiki kualitas rencana aksi dan melakukan evaluasi terhadap rencana aksi;
- b. Mendorong fungsi Tim Reformasi Birokrasi internal, *assessor*, dan tim penilai internal dalam melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi reformasi birokrasi;

c. Melakukan sosialisasi budaya kerja dan reformasi birokrasi.

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi adalah beberapa indikator dalam RB General belum tercapai karena kurangnya pemahaman dalam pemenuhan data dukung dan pencapaian indikator RB General. Solusi yang diperlukan untuk permasalahan tersebut adalah dengan peningkatan pemahaman dalam pemenuhan indikator Rb General.

Indikator Sasaran Reformasi Birokrasi di dukung oleh program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program kepegawaian daerah, program pengembangan sumber daya manusia, dan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan anggaran Rp. 2.633.173.375 dan terealisasi Rp. 2.528.991.601 atau sebesar 96,04% sehingga terjadi penghematan sebesar 3,96%. Selain itu juga terjadi efisiensi pada sumber daya manusia yang digunakan karena keterbatasan pegawai yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

3. OPINI BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. BPK RI telah melakukan pemeriksaan laporan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Akuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan Keuangan oleh BPK RI. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diperoleh hasil bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tahun 2022 yang disampaikan di tahun 2023 disajikan secara wajar dalam semua hal sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut BPK menyampaikan hasil

pemeriksaan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (**WTP**) dengan persentase capaian **100% (kinerja sangat tinggi)** dan sesuai dengan target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja indikator Opini BPK menggunakan capaian tahun 2022 karena pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2023 sampai dengan penyusunan dokumen ini masi dalam pemeriksaan.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah mendapatkan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) selama beberapa tahun berturut-turut sebagaimana pada uraian pada tabel berikut:

Tabel III.9
Opini BPK atas Laporan Keuangan

NO	TAHUN	OPINI
1.	2014	WTP
2.	2015	WTP
3.	2016	WTP
4.	2017	WTP
5.	2018	WTP
6.	2019	WTP
7.	2020	WTP
8.	2021	WTP
9.	2022	WTP
10.	2023	Dalam Pemeriksaan

Sumber Data : BPKPD Boltim

Beberapa faktor penyebab keberhasilan capaian kinerja ini dan upaya yang dilakukan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) antara lain:

- a. Penguatan komitmen dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- b. Melakukan peningkatan pemahaman kepada pengelola keuangan melalui sosialisasi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan baik Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah;

- c. Penyusunan Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi dan diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan;
- d. Meningkatkan pelaksanaan evaluasi internal dari Inspektorat Daerah;
- e. Membentuk Tim Penelusuran Barang Milik Daerah yang hilang.

Indikator Sasaran Opini BPK di dukung oleh program pengelolaan keuangan daerah, program pengelolaan barang milik daerah, program penyelenggaraan pengawasan, program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dan program perekonomian dan pembangunan dengan Anggaran Rp 4.935.954.612 dan terealisasi Rp. 4.222.127.261 atau sebesar 85,54% sehingga terjadi penghematan sebesar 14,46%. Selain itu indikator ini didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan dengan jumlah pegawai yang terbatas.

4. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Tingkat Maturitas (Maturity Level) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menggambarkan tingkatan atau struktur kematangan penyelenggaraan SPIP dengan karakteristik yang berbeda antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain. Penilaian baselin maturitas penyelenggaraan SPIP berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Berdasarkan laporan hasil evaluasi Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2023 adalah **3,003** atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 3** (Terdefinisi) sehingga mencapai target 100% atau **Kinerja Sangat Tinggi**. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 Level 2, maka terjadi peningkatan kinerja dimana di tahun 2023 menjadi Level 3 jika dibandingkan dengan target RPJMD yaitu Level 3+ maka perlu peningkatan kinerja untuk

mencapai target RPJMD. Untuk mengetahui perkembangan Nilai Maturitas SPIP beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.10
Maturitas SPIP Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Tahun 2019-2023

No	Tahun	Level
1	2019	3
2	2020	-
3	2021	2
4	2022	2
5	2023	3

Sumber Data : Inspektorat Kabupaten Boltim

Berdasarkan data diatas, Nilai Maturitas SPIP mencapai level 3 di tahun 2019. Tahun 2020 tidak dilakukan penilaian karena pedoman evaluasi sedang dilakukan penyesuaian aturan. Untuk tahun 2021 dan tahun 2022 Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Bolaang Mongondow Timur turun ke level 2 (berkembang) dan terjadi peningkatan di tahun 2023 yaitu level 3 (terdefinisi).

Faktor penyebab keberhasilan indikator Nilai Maturitas SPIP adalah:

1. Melakukan pendampingan kepada Asesor SPIP;
2. Menindaklanjuti hasil evaluasi SPIP tahun sebelumnya;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pengendalian atas pelaksanaan SOP yang ada untuk dijadikan acuan dalam peningkatan sub unsure SPIP;
4. Membuat kebijakan pendukung sebagai penerapan unsure dan sub unsur SPIP.

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan nilai SPIP adalah pemahaman Asesor dalam pelaksanaan tugas perlu ditingkatkan sehingga perlu adanya pendampingan dan peningkatan pemahaman melalui sosialisasi atau penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Indikator Sasaran Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di dukung oleh program penyelenggaraan pengawasan dan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dengan anggaran Rp. 1.459.334.070 dan terealisasi Rp. 1.451.533.254 atau sebesar 99,47% dan

terjadi penghematan sebesar 0,53%. Selain itu untuk mencapai indikator ini dilaksanakan dengan keterbatasan sumber daya manusia.

5. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Kegiatan SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, Nilai SPBE Tahun 2023 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah **2,46** dengan target 2,40 yang berarti persentase capaian **102,50% (kinerja sangat tinggi)** dan melebihi target kinerja yang diperjanjikan. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 maka terjadi peningkatan kinerja dan jika dibandingkan dengan target RPJMD 3,50 maka perlu upaya untuk mencapai target RPJMD.

Evaluasi indeks SPBE Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel III.11
Evaluasi Index Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Evaluasi Index SPBE	N/A	N/A	N/A	2,04	2,46

Sumber Data : Diskominfo Kabupaten Boltim

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selalu berupaya untuk meningkatkan Indeks SPBE, dapat dilihat dari capaian 2 tahun terakhir yang terus mengalami peningkatan.

Upaya yang dilakukan untuk memperoleh capaian sesuai dengan target yang diperjanjikan di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyempurnaan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019 dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023;

- b. Memanfaatkan layanan administrasi pemerintahan diantaranya perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan, kepegawaian, kearsipan dinamis, serta pengawasan dan kinerja pegawai;
- c. Memanfaatkan pusat data nasional dengan melakukan migrasi sejumlah aplikasi pemerintah ke dalam pusat data nasional serta membangun jaringan intra yang mengintegrasikan jaringan internet antara perangkat daerah.

Indikator Sasaran SPBE didukung oleh program aplikasi informatika dengan anggaran Rp. 1.127.003.441 dan terealisasi Rp. 694.106.305 atau sebesar 61,59% sehingga terjadi penghematan sebesar 38,41%. Indikator ini juga didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan dengan jumlah yang terbatas.

6. Indeks Inovasi Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, Tujuan inovasi daerah adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sasaran inovasi daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Pada Pasal 22 Ayat (1) dan (2) ditegaskan “ Kepala Daerah melaporkan inovasi daerah kepada “Menteri Dalam Negeri” dan “Menteri melakukan penilaian inovasi daerah berdasarkan laporan dari kepala daerah”. Kategori dan skor indeks inovasi daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timurtahun 2023 sesuai dengan pedoman umum penilaian inovasi daerah dan pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA) tahun 2023 adalah sebagai berikut

Tabel III.12
Skor dan Katergori Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023

KATEGORI	RENTANG SKOR
SANGAT INOVATIF	60,01 – 100,00
INOVATIF	35,00-60,00
KURANG INOVATIF	0,01 – 34,99
TIDAK DAPAT DINILAI	0

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2023 adalah **Kurang Inovatif** dengan skor **indeks 34,20**. Hal ini berarti persentase capaian **97,71% (Kinerja Sangat Tinggi)** walaupun demikian capaian ini tidak sesuai dengan target yang ingin dicapai yaitu Inovatif dengan skor nilai minimal 35,00.

Data Indeks Inovasi Daerah selama kurun waktu 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel III.13
Data Indeks Inovasi Daerah
Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Inovasi Daerah	N/A	Kurang Inovatif	Inovatif	Kurang Inovatif	Kurang Inovatif

Sumber Data : Bappelitbangda Kabupaten Boltim

Perkembangan indeks inovasi daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur jika dilihat dari tahun 2020-2023, mengalami peningkatan di tahun 2021 dan kembali turun menjadi kurang inovatif di tahun 2022 dan tahun 2023. Berbagai upaya telah dilakukan ditahun 2023 untuk mencapai target yang diperjanjikan salah satunya dengan melakukan lomba inovasi daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur namun perlu peningkatan pemahaman kepada perangkat daerah akan pentingnya Inovasi Daerah untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat dan memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi. Beberapa hal yang menjadi penghambat dalam pencapaian target kinerja ini adalah:

- a. Belum maksimalnya sosialisasi tentang pelaksanaan satu Perangkat Daerah satu inovasi;
- b. Belum adanya dukungan anggaran yang memadai pada tiap perangkat daerah terhadap program inovasi;

- c. Inovasi yang disampaikan dalam lomba inovasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur masi sebatas ide atau gagasan dan masi dalam tahapan uji coba.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun selanjutnya, beberapa hal yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur :

- a. Melakukan sosialisasi terkait Surat Edaran Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang peningkatan kinerja pemerintahan dengan melaksanakan program satu perangkat daerah satu inovasi;
- b. Memaksimalkan sosialisasi tentang dukungan anggaran pada saat perencanaan, pembahasan dan penetapan pada setiap perangkat daerah terkait pelaksanaan program inovasi daerah;
- c. Dokumen inovasi benar-benar diuji dalam lomba inovasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Indikator Sasaran Indeks Inovasi Daerah di dukung oleh program penelitian dan pengembangan daerah dengan anggaran Rp. 646.531.716 dan terealisasi Rp. 593.829.692 atau sebesar 91,85 sehingga terjadi penghematan sebesar 8,15%. Selain itu, indikator ini didukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah yang terbatas.

Sasaran 2
Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan
Kenyamanan Lingkungan Sosial

Untuk mencapai target realisasi sasaran 2 (Dua) “Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial” telah ditetapkan Program-program dan Anggaran Sebagai berikut

Tabel III.14
Program dan Anggaran pendukung Sasaran 2 (Dua) “ Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial”

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	54.999.446
2.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3.472.276.020

3.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	3.000.000
4.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	84.637.980
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	410.980.000
6.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2.246.573.991
Total		6.272.467.437

Untuk mengetahui hasil pencapaian Sasaran 2 (Dua) maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menetapkan 1 (Satu) indikator sasaran yaitu:

Tabel III.15
Capaian Kinerja Terwujudnya Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial

No	Indikator Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023			Target Tahun 2026 (Akhir RPJMD)
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target
1.	Persentase Deteksi Dini Konflik SARA yang Diselesaikan	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	100 %

Konflik SARA adalah perselisihan yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai daerah yang multi etnis serta memiliki berbagai macam keyakinan sehingga rentan terjadi konflik yang bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antargolongan. Untuk mengatasi atau paling tidak meminimalisir hal tersebut diperlukan suatu sikap yang arif dan bijak yakni membangun semangat kebangsaan (nasionalisme) pada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Konflik SARA yang terdeteksi di tahun 2023 sebanyak 3 (Tiga) konflik, yaitu di Desa Kotabunan/ Panang, Desa Buyat Selatan dan Desa Dodap Mikasa. Konflik yang terjadi yaitu pendirian rumah ibadah. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pertemuan dengan pihak Kepolisian, TNI, Kecamatan aparat setempat dan tokoh-tokoh agama untuk mengadakan mediasi sehingga diselesaikan dengan baik, dan para pihak yang berselisih dapat berdamai dan hidup perdamaian. Hal ini menandakan bahwa Bolaang Mongondow Timur dapat mempertahankan keamanan dan kenyamanan sehingga konflik SARA dapat diselesaikan

Persentase deteksi dini konflik SARA yang diselesaikan pada tahun 2023 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah **100%** sehingga target tahun 2023 terealisasi **100% (Kinerja Sangat Tinggi)**. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 tidak mengalami kenaikan/penurunan, dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur maka capaian kerjanya adalah 100%. Data Persentase deteksi dini konflik SARA yang diselesaikan selama kurun waktu 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel III.16
Persentase deteksi dini konflik SARA yang diselesaikan
Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase deteksi dini konflik SARA yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data : Kesbangpol Kabupaten Boltim

Pada 5 tahun terakhir Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berupaya agar konflik SARA tidak terjadi dalam bentuk apapun. Berbagai upaya dilakukan sehingga target kinerja ini tercapai dan diharapkan sampai dengan target RPJMD. Berikut ini upaya yang dilakukan dan penyebab keberhasilan capaian kinerja indikator persentase deteksi dini konflik SARA yang diselesaikan:

- a. Penyiapan tenaga pengendali dan kenyamanan lingkungan dengan melibatkan unsur Polres Bolaang Mongondow Timur, Badan Intelejen Negara, Unsur TNI dan Kejaksaan;
- b. Pembentukan forum kewaspadaan dini masyarakat;
- c. Pengawasan terhadap orang asing;
- d. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- e. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan social bagi generasi muda;
- f. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba.

Indikator Sasaran Persentase Deteksi Dini Konflik SARA Yang Diselesaikan di dukung oleh program penguatan ideology pancasila dan karakter bangsa, program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik, program pemberdayaan dan pengawasan organsiasi kemasyarakatan, program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya, program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik social program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dengan anggaran Rp. 6.272.467.437 dan terealisasi Rp. 3.232.284.371 atau sebesar Rp. 51,53 dan terjadi penghematan sebesar 48,47%. Selain itu, indikator ini didukung oleh sumber daya manusia yang terbatas.

**MISI 2 : MENINGKATKAN BUDAYA DAN PARIWISATA YANG
BERKEARIFAN LOKAL**

Tujuan

Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan Dan Daya Tarik Destinasi

Sasaran 3

Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kunjungan Wisata

- PDRB Per Kapita Bolaang Mongondow Timur 2021-2023

**Tabel III.17
PDRB**

KETERANGAN	TAHUN		
	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
PDRB Per Kapita	36.448.419,75	39.206.547,24	41.772075,35

Sumber Data : BPS 2024

Untuk mencapai target realisasi sasaran 3 (Tiga) “ Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Kunjungan Wisata”, telah ditetapkan Program-program dan Anggaran sebagai berikut:

**Tabel III.18
Program dan Anggaran pendukung Sasaran 3 (Tiga);” Meningkatkan Kuantitas
dan Kualitas Kunjungan Wisata ”**

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	786.187.265
2.	Program Pemasaran Pariwisata	954.034.932
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	674.183.762
4.	Program Pengembangan Umkm	44.340.060
5.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	80.968.067
6.	Program Pengembangan Ekspor	54.994.500
7.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	195.671.513
8.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	357.527.789
9.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	369.817.943
10.	Program Penyediaan Dan Pengembangan	1.063.224.653

	Prasarana Pertanian	
11.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	184.994.827
12.	Program Penyuluhan Pertanian	492.344.615
13.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.541.823.436
14.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	210.615.064
	Total	7.010.728.426

Untuk mengetahui hasil pencapaian sasaran 3 (Tiga) maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menetapkan 3 (Tiga) Indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel III.19
Capaian Kinerja Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Kunjungan Wisata

No	Indikator Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023			Target Tahun 2026 (Akhir RPJMD)
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target
1.	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan PDRB	3,5	1,37	39,14	4	1,81	45,25	4,5
2.	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	7,80	11,86	152,05	7,82	17,27	220,84	7,95
3	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB	5,38	8,99	167,10	5,88	7,13	121,26	6,38

Sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kunjungan Wisata dengan 3 Indikator sasaran pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan PDRB

Pariwisata merupakan sektor strategis yang harus dimanfaatkan untuk pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan membantu mengurangi jumlah pengangguran.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2023 atas Persentase Kontribusi sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan PDRB, dari target yang ditetapkan 4% dengan Realisasi **1,81%** sehingga persentase capaiannya adalah **45,25% (Kinerja Sangat Rendah)**, capaian ini tidak sesuai target yang diperjanjikan.

Perkembangan Realisasi Persentase Kontribusi sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dari tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel III.20
Realisasi Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan PDRB
Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan PDRB	0,39	0,34	1,20	1,37	1,81

Sumber Data : DinasPariwisata Boltim

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur akibat Covid-19 yang berdampak di berbagai sektor termasuk sektor pariwisata. Dapat dilihat bahwa di tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat besar yaitu 0,34 dari capaian tahun 2019 0,39. Di tahun 2021 1,20, tahun 2022 1,37 dan tahun 2023 mulai terjadi peningkatan walaupun secara perlahan yaitu 1,81. Tempat-tempat Wisata yang terdaftar dan Obyek-obyek wisata yang menunjang dan dapat meningkatkan sektor pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah:

Tabel III.21
Tempat Wisata Terdaftar di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

NAMA TEMAT WISATA	ALAMAT
Danau Mooat	Kecamatan Mooat
D'Mooat Café Strawberry	Kecamatan Mooat
Goba Molunow	Kecamatan Mooat
Permandian Kali Panas Candi Rejo	Kecamatan Modayag
The Banyu Etan Kali	Kecamatan Modayag
Atoga River View	Kecamatan Motongkad
Pantai Chimoki	Kecamatan Nuangan
Pantai Cemara Batu Buaya	Kecamatan Motongkad
Tanjung Silar	Kecamatan Motongkad

Sumber Data : BPS Boltim Dalam Angka 2023

Tabel. III.22
Obyek Wisata Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

KECAMATAN	JENIS OBJEK WISATA
Nuangan	Pulau Laga Besar
	Pulau Laga Kecil
	Pantai Iyok
	Pasir Putih Matabulu
	Pantai Matabulu
	Pantai Nuangan
	Mercusuar
	Tanjung Flesko
	Air Terjun Matabulu
	Air Terjun Idumun
Motongkad	Tanjung Silar
	Pantai Ariang
	Danau Pononotok
Tutuyan	Pulau Ibantong
	Pantai Woka
	Pantai Togid
	Pantai Tutuyan

	Pantai Tombolikat
	Situ Tutuyan
	Danau Tabang
	Danau Bunong
	Air Terjun Tombolikat
	Pononagaan
	Paragliding Sehan Landjar Site
	Pengembangan Desa Wisata
Kotabunan	Belerang Liberia
	Pulau Racun/Pinonoguan
	Pulau Kumeke
	Pulau Nenas/Bambuyanoi
	Pantai Kotabunan
	Pantai Buyat
	Pantai Paret
	Danau Buyat
	Danau Nenas
	Air Terjun Arirang
	Permandian Kolam Renang Paret
	Permandian Kola Renang Bukaka
	Pengembangan Desa Wisata Kotabunan
	Lesung Batu Bukaka 1
	Lesung Batu Bukaka 2
	Lesung Batu Kotabunan
Modayag	Outbond Tobongon
	Air Terjun Liberial
	Air Terjun Purworejo
	Air Terjun Badaro
	Bendungan Purworejo
	Tambang Emas J. Resort
Mooat	Danau Mooat
	Danau Tondok

	Danau Paya-paya
	Danau Moayat
	Danau Air Panas Gunung Ambang
	Kafe Stoberry
	Holtikultura Guaan
	Lumpang Batu Guaan
	Meja Batu Guaan
Modayag Barat	Pemandian Air Panas Bongkudai Barat
	Pemandian Air Panas Bangunan Wuwuk
	Pemandian Air Dingin Moyongkota

Sumber : BPS Tahun 2024

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui Dinas Pariwisata melakukan berbagai kegiatan di tahun 2023 untuk peningkatan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu, Festival Kabela, Java Fest dan Mooat Holticulture Festival. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengenalkan dan melestarikan suku dan budaya di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur serta menjadikan keanekaragaman budaya sebagai atraksi wisata.

Faktor penyebab tidak tercapainya target Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pertumbuhan PDRB tahun 2023 antara lain:

- a. Target capaian yang terlalu tinggi;
- b. Menurunnya jumlah kunjungan wisata pada tempat-tempat wisata;
- c. Sarana transportasi ke tempat wisata yang masi terbatas;

Dengan tidak tercapainya kinerja sektor pariwisata di tahun 2023 dengan angka 1.81% menjadikan dorongan bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk melakukan Upaya-Upaya pemulihan sektor Pariwisata dengan cara sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat di tempat-tempat wisata;
- b. Mengikuti Iven dan Festifal seni budaya Pariwisata untuk kembali memperkenalkan obyek-obyek Wisata di Bolaang Mongondow Timur;

- c. Melakukan promosi-promosi Pariwisata melalui media social; FB, WA, IG dan Jaringan Internet;
- d. Melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa dan Kelompok Sadar Wisata dalam mengelola objek wisata;
- e. Memperluas jaringan investasi mengingat Bolaang Mongondow Timur memiliki lingkungan pariwisata yang unik dan beragam untuk ditawarkan kepada investor.

Indikator Sasaran Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan PDRB di dukung program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, program pemasaran pariwisata, program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dengan anggaran Rp. 2.414.405.959 dan terealisasi Rp. 1.787.382.129 atau sebesar 74,03% sehingga terjadi penghematan sebesar 25,97%. Selain itu, indikator ini dukung oleh sumber daya manusia yang terbatas.

2. Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Sektor perdagangan merupakan salah satu bagian dari sistem mata rantai perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang pengaruhnya sangat kuat terhadap perkembangan dan pertumbuhan baik internal dan eksternal. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki 186 sarana perdagangan yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan. Jika dilihat berdasarkan jenisnya, 7 sarana perdagangan merupakan pasar, 155 sarana merupakan kios, dan 24 sarana merupakan los.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2023 atas Persentase Kontribusi sektor Perdagangan Terhadap PDRB, dari target yang ditetapkan 7,82% dengan Realisasi **17,27%** sehingga persentase capaiannya adalah **220,84% (Kinerja Sangat Tinggi)**, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan bahkan jika dibandingna dengan target RPJMD yaitu 7,95 sudah melebihi target RPJMD. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu

tahun 2022 dengan realisasi 11,86% maka tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

Perkembangan Realisasi Persentase Kontribusi sektor Perdagangan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dari tahun 2020-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel III.23
Realisasi Persentase Kontribusi sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2020-2023

Tahun	2020	2021	2022	2023
Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap Pertumbuhan PDRB	2,22	4,18	11,86	17,27

Sumber Data : BPS Boltim Dalam Angka 2024

Pada sektor perdagangan mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2020 diakibatkan oleh pandemic Covid-19. Pemulihan mulai terjadi di tahun 2021 dan kenaikan yang cukup tinggi ditahun 2022 yaitu 11,86 dan 17,27 di tahun 2023 sehingga melebihi target yang diperjanjikan. Sektor perdagangan di Bolaang Mongondow Timur hanya bergerak pada usaha mikro kecil dan menengah. Sektor perdagangan yang menopang PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berupa sarana perdagangan yang tersebar di 7 Kecamatan beserta jumlah pedagang menurut kecamatan. Data tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel III.24
Data Penopang Sektor Perdagangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Kecamatan	Jumlah Pasar	Jumlah Pedagang Per Kecamatan
Modayag	2	757
Kotabunan	2	724
Tutuyan	1	408
Motongkad	1	188
Nuangan	1	393
Modayag Barat	-	710
Mooat	-	141
JUMLAH	7	3.321

Sumber : BPS Boltim Dalam Angka Tahun 2024

Penyebab Keberhasilan indikator ini adalah adanya peningkatan pada jumlah pelaku usaha dan daya beli masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah sehingga sektor perdagangan dapat melebihi target yang diperjanjikan antara lain:

- a. Melakukan perbaikan pada sarana perdagangan untuk meningkatkan minat dagang masyarakat;
- b. Menarik investor yang dapat merubah bahan mentah menjadi bahan jadi;
- c. Melakukan program-program kegiatan yang dapat mendorong kerjasama dagang antar daerah;
- d. Meningkatkan promosi pada sektor perdagangan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Indikator Sasaran Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB di dukung oleh program pengembangan UMKM, program peningkatan sarana distribusi perdagangan, program pengembangan ekspor, program perencanaan dan pembangunan industri dan program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan anggaran Rp. 733.501.929 dan terealisasi Rp. 720.372.533 atau sebesar 98,21% sehingga terjadi penghematan sebesar 1,79%. Selain itu, indikator ini didukung oleh sumber daya manusia yang terbatas.

3. Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2023 Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Persentase Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB, dari target yang ditetapkan 5,88% dengan Realisasi **7,13%** sehingga persentase capaiannya

adalah **121,26% (Kinerja Sangat Tinggi)**, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Realisasi Persentase Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB tahun 2023 adalah 17,27%, bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 6,38, maka sudah mencapai target RPJMD.

Perkembangan Realisasi Persentase Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dari tahun 2020-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel III.25
Realisasi Persentase Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB Tahun 2020-2023

Tahun	2020	2021	2022	2023
Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap Pertumbuhan PDRB	5,54	8,88	8,99	7,13

Sumber Data : BPS Boltim Dalam Angka 2024

Berdasarkan tabel diatas terlihat selama periode tahun 2020-2022 kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Bolang Mongondow Timur terhadap PDRB terus mengalami kenaikan dan turun di tahun 2023. Tahun 2020 5,54, tahun 2021 8,88%, tahun 2022 8,99% dan tahun 2023 turun menjadi 7,13. Walaupun tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan target tahun 2023 maka capaian kinerja tercapai. Capaian Indikator yang melebihi target tahun 2023 ini didukung oleh:

1) Sektor Pertanian

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki berbagai macam perkebunan yang ditanam di tanah pesisir dan pegunungan. Untuk luas areal tanaman perkebunan yang paling luas adalah perkebunan kelapa dengan total luas sebesar 9610 hektar. Perkebunan terbesar kedua adalah perkebunan kopi dengan luas total sebesar 2391,59 hektar dan perkebunan dengan luas paling kecil adalah perkebunan coklat/kakao dengan luas sebesar 2.075,1 hektar.

2) Sektor Kehutanan

Kontribusi sektor Kehutanan tidak lagi menyumbang terhadap PDRB kabupaten di sebabkan kewenangan Penyelenggaraan Kehutanan di daerah sudah di tangani oleh Provinsi. Sebagaimana isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Demikian juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang membatasi kewenangan Daerah Kabupaten atas Pengelolaan Hasil Hutan. Sehingga dalam UU Cipta Kerja Pengelolaan Hutan telah menjadi kewenangan Provinsi.

3) Sektor Perikanan

Sektor perikanan memberi kontribusi yang cukup besar bagi PDRB kabupaten Bolaang Mongondow Timur di tahun 2023. Data BPS Bolaang Mongondow Timur Dalam Angka Tahun 2024 Produksi sektor Perikanan Bolaang Mongondow Timur terdiri atas produksi perikanan laut dan produksi perikanan darat. Untuk produksi perikanan laut yang paling banyak di hasilkan adalah komoditas ikan tuna yaitu sebanyak 2.676,66 ton pada tahun 2023 dan paling sedikit komoditas roa sebanyak 13,76 ton, sedangkan untuk produksi perikanan budidaya, komoditas ikan yang paling banyak ditangkap/diproduksi adalah ikan nila sebanyak 462,17 ton dan paling sedikit adalah komoditas ikan gurame sebanyak 18,02 ton.

Indikator Sasaran Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di dukung oleh program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, program penyuluhan pertanian, program pengelolaan perikanan tangkap dan program pengelolaan perikanan budidaya dengan anggaran Rp. 3.862.820.538 dan terealisasi Rp. 3.602.588.577 atau sebesar 93,26% sehingga terjadi penghematan sebesar 6,74. Selain itu, indikator ini didukung oleh sumber daya manusia yang terbatas.

MISI 3 : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

Tujuan

Meningkatkan Pelayanan Wajib Yang Menyentuh Langsung Pada

Masyarakat

Sasaran 4

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

- IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2019-2023

Tabel III.26

IPM

KETERANGAN	TAHUN				
	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
IPM	68,08	65,99	66,55	67,21	67,95

Sumber Data : Bappelitbangda 2024

Untuk mencapai target realisasi sasaran 4 (Empat) “ Meningkatkan Kualitas Infrastruktur”, telah ditetapkan Program-program dan Anggaran sebagai berikut:

Tabel III.27

Program dan Anggaran pendukung Sasaran 4 (Empat);” Meningkatkan Kualitas Infrastruktur ”

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Penyelenggaraan Jalan	45.991.144.193
2.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.509.318.100
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.472.716.400
4.	Program Kawasan Permukiman	131.380.000
5.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	3.710.000
6.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	550.000.000
7.	Program Penanggulangan Bencana	604.744.029
8.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.302.530.000
9.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.570.403.933
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	11.720.462
	Total	56.147.667.117

Untuk mengetahui hasil pencapaian sasaran 4 (Empat) maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menetapkan 6 (Enam) Indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel III. 28
Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

No	Indikator Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023			Target Tahun 2026 (Akhir RPJMD)
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target
1.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	0,48	0,50	104,17	0,50 (50,35)	0,52 (52,38)	104 (104,04)	0,57
2.	Persentase Jumlah Penduduk yang berakses Air Minum	73,09	74,63	102,11	74,29	72,74	97,91	76,35
3	Persentase Rumah Tinggal Bersantitas	59,8	61,15	102,26	60,16	60,23	100,12	60,91
4.	Persentase Rumah Layak Huni	85,30	85,53	100,27	85,86	85,53	99,62	87,83
5.	Persentase terbentuknya Desa Tangguh Bencana	2	2 (2 Desa)	100	2 Desa (40%)	2 Desa (40%)	100	10
6.	Indeks Desa Membangun	49,38	55,5	112,39	56,79	70,37	123,91	90,12

Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dengan 6 Indikator sasaran pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2023 atas Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik, dari target yang di tetapkan 0,50 (50,35%) atau 277,44 km dengan realisasi **0,52 (52,38)** atau 288,65 km sehingga persentase capaiannya adalah **104% (Kinerja Sangat Tinggi)**, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Penambahan realisasi ini

dipengaruhi oleh pelaksanaan pekerjaan jalan di tahun 2023 dengan total panjang 12,81 km.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan 0,02 dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 0,57 maka capaian belum tercapai dan perlu upaya dalam peningkatan capaian.

Perkembangan Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dari tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel III.29
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	0,45	0,47	0,48	0,50	0,52

Sumber Data : Dinas PU 2023

Dapat dilihat bahwa 5 tahun terakhir dari tahun ke-tahun menunjukkan peningkatan kinerja pada proporsi panjang jalan dalam kondisi baik. Tahun 2019 0,45 sampai tahun 2023 0,52.

Dalam mewujudkan indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melaksanakan program penyelenggaraan jalan kabupaten, dengan kegiatan pada masing-masing program adalah sebagai berikut:

Tabel III.30
Daftar Pembangunan Jalan Tahun 2023

NO	Nama Paket Pekerjaan	Realisasi	
		Panjang Aspal (m)	Panjang Perkerasan (m)
A	Pembangunan Jalan	115	3.355
1.	Pembangunan Jalan Bongkudai-Binuang	700	-
2.	Pembangunan Jalan Tulalang-Molengku	115	2.430
3.	Pembangunan Jalan Perkebunan Tabang	-	225
B.	Rekonstruksi Jalan	9.093	250
1.	Peningkatan Jalan Kayumoyondi-Perkebunan (DAK)	2.100	-

2.	Peningkatan Jalan Nuangan-Rata Uyu (DAK)	9	-
3.	Peningkatan Jalan Desa Buyat	1.584	-
4.	Peningkatan Jalan IKK Modayag Tahap II	1.825	-
5.	Peningkatan Jalan Perkebunan Mooat	1.181	150
6.	Peningkatan Jalan Togulu-Inalaom	2.000	100
9.	Peningkatan Jalan Tutuyan-Pasar Tutuyan Tahap II	394	-
	TOTAL	9.908	2.905
	Total Panjang Jalan	12.813	

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja maupun peningkatan kinerja proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dipengaruhi oleh beberapa faktor/penyebab, yaitu:

- a. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melakukan pembangunan jalan setiap tahun:
- b. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring setiap triwulan untuk inventarisasi kondisi jalan
- c. Mengadakan rekonstruksi jalan.

Upaya solusi yang dilakukan untuk peningkatan capaian indikator ini adalah dengan peningkatan alokasi anggaran pada program penyelenggaraan jalan kabupaten/kota.

Gambar III.1
Jalan yang di Bangun Tahun 2023



Indikator Sasaran Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di dukung oleh program penyelenggaraan jalan dengan anggaran Rp. 45.991.144.193 dan terealisasi Rp. 3.602.588.577 atau sebesar 97,90% sehingga terjadi penghematan sebesar 2,10%. Selain itu indikator ini didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten.

2. Persentase Jumlah Penduduk yang Berakses Air Minum

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2023 atas Persentase Jumlah Penduduk Yang Berakses Air Minum, dari target yang ditetapkan **74,29** dengan Realisasi **72,74%** sehingga persentase capaiannya adalah **97,91% (Kinerja Sangat Tinggi)**, walaupun capaian ini sangat tinggi namun belum sesuai dengan target yang ingin dicapai. Penurunan realisasi penerima manfaat sampai dengan tahun 2023 ini disebabkan adanya asumsi penambahan jumlah penduduk di tahun 2023 yang menjadi pembagi dari realisasi yang ada sehingga menyebabkan persentase realisasi tidak capai target.

Realisasi Persentase Jumlah Penduduk Yang Berakses Air Minum tahun 2022 adalah 74,63%, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 72,74, maka mengalami peningkatan kinerja dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 76,35 maka capaian kinerja belum tercapai dan perlu upaya untuk peningkatan kinerja.

Formulasi penghitungan Persentase Jumlah Penduduk Yang Berakses Air Minum sebagai berikut:

$$\text{Formulasi perhitungan} = \frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$$

Jumlah penduduk yang berakses air minum di tahun 2023 adalah 17.454 KK dengan asumsi kepala keluarga ditahun 2023 sebanyak 23.994KK sehingga persentase jumlah penduduk yang berakses air minum tahun 2023 adalah 72,74% dari jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Penurunan realisasi penerima manfaat sampai tahun 2023 ini disebabkan adanya penambahan jumlah penduduk di tahun 2023 yang menjadi pembagi dari realisasi sehingga menyebabkan persentase menurun dan di tahun 2023 belum ada pekerjaan air bersih yang dilaksanakan.

Perkembangan Persentase Jumlah Penduduk Yang Berakses Air Minum di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dari tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel III.31
Persentase Jumlah Penduduk Yang Berakses Air Minum
Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Jumlah Penduduk Yang Berakses Air Minum	75,72	71,82	73,08	74,63	72,74

Sumber Data : Dinas PU 2023

Dari data diatas memberikan gambaran persentase jumlah penduduk yang berakses air minum dari tahun ke tahun. Tahun 2019 75,72% dari jumlah penduduk sebanyak 72.408, Tahun 2020 71,82% dari jumlah penduduk sebanyak 88.241, Tahun 2021 dari jumlah penduduk sebanyak 89.981 sebesar 73,08% dan di Tahun 2022 74,63% atau 17.454kk dan Tahun 2023 72,74% atau 17454kk. Kenaikkan dan penurunan persentase Jumlah Penduduk Yang berakses air minum sangat di pengaruhi oleh bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ketahun.

Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya anggaran untuk penanganan air bersih dan terdapat fasilitas air bersih yang sumber mata airnya mulai berkurang sehingga debit air menurun. Solusi yang harus dilakukan yaitu dengan penambahan debit melalui kegiatan optimalisasi air bersih dan melakukan sosialisasi kepada warga khususnya yang tinggal disekitar mata air agar tidak menebang pohon sembarangan untuk menjaga sumber mata air. Keberhasilan/ kegagalan dalam pencapaian kinerja maupun peningkatan/ penurunan kinerja persentase Jumlah Penduduk Yang berakses air minum dipengaruhi oleh beberapa faktor/penyebab, yaitu:

- a. Penganggaran untuk program pembangunan di bidang air minum setiap tahun;

- b. Perbaiki fasilitas air bersih yang sumber mata airnya mulai berkurang sehingga debit air minum menurun yang menyebabkan kekurangan air;
- c. Melakukan penambahan debit melalui kegiatan Optimalisasi air bersih;

Melakukan sosialisasi kepada warga khususnya yang tinggal dan berkebun di sekitar mata air agar tidak menebang pohon-pohon yang ada disekitar mata air untuk menjaga sumber mata air tetap terjaga.

Indikator Sasaran Persentase Jumlah Penduduk Yang Berakses Air Minum di dukung oleh program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum dengan anggaran Rp. 2.509.318.100 dan terealisasi Rp. 2.476.321.771 atau sebesar 98,69% sehingga terjadi penghematan sebesar 1,31%. Indikator ini didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten.

3. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Salah satu persyaratan rumah sehat adalah memiliki layanan sanitasi untuk mencegah penyakit menular, mencegah timbulnya bau tidak sedap, menghindari pencemaran dan lingkungan menjadi bersih, sehat dan nyaman. Untuk mengetahui persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Bolaang Mongodow Timur di tahun 2023 digunakan rumus:

$$\text{Formulasi perhitungan} = \frac{\text{Jmlh R T Bersanitasi Layak}}{\text{Jumlah Seluruh RT}} \times 100$$

Tahun 2023 rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah 14.451kk, dengan asumsi total kepala keluarga 29.994kk.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2023 atas Persentase Rumah tinggal bersanitasi, dari target yang di tetapkan 60,16% dengan realisasi **60,23%** atau 14.451kk, sehingga persentase capaiannya adalah **100,12% (Kinerja Sangat Tinggi)**, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Jila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 61,15 maka terjadi penurunan capaian kinerja.

Perkembangan Persentase Rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dari tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel III.32
Persentase Rumah tinggal bersanitasi
Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	59,96	59,76	60,35	61,15	60,23

Sumber Data : Dinas PU 2023

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir persentase rumah tinggal bersanitasi mengalami penurunan kinerja di tahun 2020 salah satunya diakibatkan oleh Covid-19. Ditahun 2021 dan tahun 2022 mengalami kenaikan yang tidak telalu tinggin dan di tahun 2023 kembali turun menjadi 60,23. Kenaikan maupun penurunan persentase Rumah Tinggal Bersanitasi sangat di pengaruhi oleh bertambahnya rumah yang di bangun oleh masyarakat setiap tahun.

Dalam mewujudkan indikator rumah tinggal bersanitasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan program pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman, dengan kegiatan sebagai berikut :

Tabel III.33
Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat
Skala Permukiman

No	PROGRAM/KEGIATAN	PENERIMAAN MANFAAT
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	
1	Pembangunan spaldas Individual Desa Bulawan (Eamarked)	48 KK
2	Pembangunan Spaldas Individual Desa Bulawan I (Eamarked)	24 KK
3	Pembangunan Spaldas Individual Desa Kotabunan	23 KK
4	Pembangunan Spaldas Individual Desa Nuangan Barat (Eamarked)	19 KK
5	Pembangunan Spaldas Individual Desa Togid (Eamarked)	19 KK
	JUMLAH	151 kk

Faktor penyebab tercapainya target kinerja indikator Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di tahun 2023 adalah:

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membangun WC yang memenuhi standar yang tidak mencemari tanah;
- b. Memberikan pengertian kepada masyarakat untuk tidak buang air besar sembarangan;
- c. Pelaksanaan program pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limba Terpusat.

Permasalahan yang dihadapi adalah masih terdapat kelompok masyarakat yang belum memahami pemeliharaan dari sarana sanitasi yang dibangun. Solusi yang dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat menggunakan dengan baik sarana sanitasi yang telah terbangun serta mengelola dan menjaga kebersihannya.

Indikator Sasaran Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di dukung oleh program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah dengan anggaran Rp. 2.472.716.400 dan terealisasi Rp 2.471.987.000 atau sebesar 99,97 sehingga terjadi penghematan sebesar 0,03. Selain itu, indikator ini didukung oleh sumber daya manusia yang terbatas.

4. Persentase Rumah Layak Huni

Rumah layak huni atau RLH adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni. Rumah layak huni harus memiliki struktur konstruksi yang kuat, luas bangunan yang ideal, sanitasi yang baik, serta ketersediaan suplai air bersih di rumah tersebut. Definisi RLH diatur dalam UU 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Pasal 24 huruf A. Untuk mengetahui persentase rumah layak huni tahun 2023 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur digunakan rumus:

$$\text{Formulasi perhitungan} = \frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah}} \times 100$$

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2023 atas Persentase Rumah Layak Huni, dari target yang di tetapkan 85,86 atatu 15.223 rumah layak huni dengan Realisasi **85,53%** atau 15164 sehingga persentase capaiannya adalah **99,62% (Kinerja Sangat Tinggi)**, keterbatasan anggaran menyebabkan capaian kinerja indikator ini tidak tercapai 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 85,53 maka tidak terjadi peningkatan karena tidak ada kegiatan perbaikan rumah layak huni di tahun 2023 akibat keterbatasan anggaran. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 87,83, maka target RPJMD belum tercapai.

Perkembangan Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dari tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel III.34
Persentase Rumah Layak Huni
Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Rumah Layak Huni	-	-	85,35	85,53	85,53

Sumber Data : Dinas PU 2023

Dapat dilihat bahwa perbandingan hanya dapat dilihat dari tahun 2021, 2022 dan 2023. Terjadi peningkatan di tahun 2022 dan di tahun 2023 tidak terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya karena tidak ada kegiatan perbaikan rumah layak huni di tahun 2023 akibat keterbatasan anggaran.

Solusi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja kedepan adalah:

- a. Mengalokasikan anggaran pada kegiatan perbaikan rumah layak huni
- b. Monitoring dan evaluasi untuk pendataan rumah tidak layak huni setiap triwulan;

- c. Membuat usulan proposal pembangunan pada pemerintah pusat untuk peningkatan anggaran dalam pemecahan masalah keluarga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.

Indikator Sasaran Persentase Rumah Layak Huni di dukung oleh program kawasan permukiman dan program perumahan dan kawasan permukiman kumuh dengan anggaran Rp. 135.090.000 dan terealisasi Rp. 122.561.428 atau sebesar 90,73% sehingga terjadi penghematan sebesar 9,27%.

5. Persentase Terbentuknya Desa Tangguh Bencana

Desa yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman diwilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana dapat dikategorikan sebagai desa tangguh bencana. Untuk mengetahui persentase terbentuknya desa tangguh bencana digunakan rumus:

$$\text{Formulasi perhitungan} = \frac{\text{Desa Tangguh yg Terbentuk}}{\text{Desa Rawan Bencana}} \times 100$$

Adapun indikator desa tangguh bencana menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012:

1. Kebijakan/peraturan di desa/kelurahan tentang PB/PRB
2. Rencana penanggulangan bencana, rencana aksi komunitas, dan/atau rencana kontijensi
3. Forum PRB
4. Relawan penanggulangan bencana
5. Kerjasama antar pelaku dan wilayah
6. Dana tanggap darurat
7. Dana untuk PRB
8. Pelatihan untuk pemerintah desa

9. Pelatihan untuk tim relawan
10. Pelatihan untuk warga desa
11. Pelibatan/partisipasi warga desa
12. Pelibatan perempuan dalam tim relawan
13. Peta dan kajian resiko
14. Peta dan jalur evakuasi serta tempat pengungsian
15. Sistem peringatan dini
16. Pelaksanaan mitigasi struktural (fisik)
17. Pola ketahanan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat
18. Perlindungan Kesehatan kepada kelompok rentan
19. Pengelolaan sumber daya alam untuk PRB
20. Perlindungan aset produktif utama masyarakat

Berdasarkan indikator tersebut pada tahun 2023 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah terbentuk 2 Desa tangguh bencana dari 5 desa yang teridentifikasi masuk dalam desa rawan bencana. Hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2023 atas Persentase Terbentuknya Desa Tangguh Bencana, dari target yang ditetapkan 2 Desa atau 40% dengan realisasi **2 Desa atau 40%** sehingga persentasenya adalah **100% (Kinerja Sangat Tinggi)**. Desa tangguh bencana yang terbentuk di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah Desa Jiko dan Desa Jiko Utara. Solusi yang dilakukan untuk menghadapi hambatan dalam pencapaian indikator ini adalah optimalisasi pelaksanaan kegiatan identifikasi dan sosialisasi daerah rawan bencana dengan menambahkan keterwakilan desa sekitar. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 maka capaian kinerjanya sama yaitu terbentuk 2 desa tangguh bencana. Capaian persentase terbentuknya desa tangguh bencana 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.35
Persentase Terbentuknya Desa Tangguh Bencana Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Terbentuknya Desa Tangguh Bencana	-	-	-	2 Desa	2 Desa (40%)

Capaian persentase terbentuknya desa tangguh bencana jika dilihat dari 5 tahun terakhir, Tahun 2022 merupakan tahun awal terbentuknya desa tangguh bencana dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian kinerjanya belum tercapai.

Faktor penyebab keberhasilan indikator terbentuknya desa tangguh bencana adalah:

1. Penyusunan tingkat kerawanan bencana setiap desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berdasarkan jenis bencananya;
2. Penyusunan rencana penanggulangan bencana desa;
3. Memberikan pemahaan dan mendorong desa untuk pembentukan desa tangguh bencana;

Indikator Sasaran Persentase Terbentuknya Desa Tangguh Bencana didukung oleh program program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dan program penanggulangan bencana dengan anggaran Rp. 1.154.744.029 dan terealisasi Rp. 1.136.277.665 atau sebesar 98,40% sehingga terjadi penghematan 1,60%. Indikator ini didukung oleh sumber daya manusia yang terbatas serta sarana yang terbatas.

6. Indeks Desa Membangun

Kemajuan desa merupakan tolak ukur kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Penerapan Undang-undang desa secara konsisten dan bertanggungjawab harus mampu menjadikan desa tampil dipanggung utama pembangunan ekonomi Republik Indonesia, termasuk juga pembangunan ekonomi di setiap daerah. Untuk itu, kebangkitan desa merupakan sebuah fenomena yang diharapkan agar terus tumbuh dan berkembang untuk menyongsong kemandirian desa.

Secara umum pedoman Indeks Desa Membangun (IDM) disusun untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam memanfaatkan data dan informasi Indeks Desa Membangun sebagai salah satu

basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan desa. Tujuan khusus penyusunan Indeks Desa Membangun adalah agar bisa digunakan sebagai basis data (base line) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa, salah satu input (fokus) dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, masukan dalam perumusan targetting (sasaran lokasi) terkait dengan target pembangunan nasional dan instrumen koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah dan desa, guna efektifitas capaian sasaran pembangunan nasional.

Dalam pengukuran status desa oleh Kemendes, terdapat 5 (Lima) klasifikasi status Desa dalam Index Desa Membangun IDM. Lima status itu adalah: < >

- 1) Desa Sangat Tertinggal, skor IDM $< 0,491$,
- 2) Desa Tertinggal, Skor IDM $> 0,491$ dan $< 0,599$,
- 3) Desa Berkembang, skor IDM $> 0,599$ dan $< 0,707$,
- 4) Desa Maju, Skor IDM $> 0,707$ dan $< 0,815$,
- 5) Desa Mandiri, Skor IDM $> 0,815$.

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menetapkan target capaian Index Desa Membangun pada kategori persentase Jumlah Desa Berkembang di RPJMD 2016-2021, dan persentase Desa Maju dan Mandiri pada RPJMD 2021-2026. Sehingga angka yang di tetapkan pada target RPJMD 2021-2026 adalah persentase jumlah Desa Maju dan Mandiri di kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bukan angka Index Desa Membangun.

Jumlah seluruh Desa Di kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah 81 Desa dengan jumlah desa berdasarkan klasifikasi status Desa kurun waktu 2020-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel III.36
Status Desa

No	Status Desa	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	SANGAT TERTINGAL	0	0	0	0
2	TERTINGGAL	14	2	0	0
3	BERKEMBANG	54	41	36	24
4	MAJU	13	38	41	41
5	MANDIRI	0	0	4	16

Sumber: Dinas PMD, 2023

Tabel III.37
Persentase Desa Maju dan Mandiri
Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Desa Maju dan Mandiri	7,41	16,05	46,91	55,5	70,37

Sumber : Dinas PMD, 2023

Dapat dilihat bahwa dari tahun 2019 sampai dengan 2023 persentase desa maju dan mandiri terus mengalami peningkatan. Peningkatan yang tinggi terjadi di tahun 2021 yaitu 46,91 datahun 2020 yaitu 16,05 dan di tahun 2022 55,5 dan di tahun 2023 yaitu 70,37.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2023 atas Persentase Desa Maju dan Mandiri, dari target yang di tetapkan 56,79 dengan Realisasi 41 desa maju dan 16 desa mandiri total 57 Desa maju dan mandiri atau **70,37%** sehingga persentase capaiannya adalah **123,91% (Kinerja Sangat Tinggi)**, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 55,5 maka terjadi peningkatan kinerja di tahun 2023 dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu 90,12, maka perlu adanya peningkatan kinerja.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja maupun peningkatan kinerja persentase desa maju dan mandiri dipengaruhi oleh beberapa faktor/penyebab, yaitu:

- a. Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Bimbingan teknis dan sosialisasi kepada aparatur desa;

c. Kegiatan lomba-lomba yang mengikutsertakan desa.

Indikator Sasaran Indeks Desa Membangun di dukung oleh program administrasi pemerintahan desa, program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat dan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan anggaran Rp 3.884.654.395 dan terealisasi Rp. 3.854.504.910 atau sebesar 99,22% sehingga terjadi penghematan sebesar 0,78%. Indikator ini didukung oleh sumber daya yang kompeten dan dengan jumlah yang terbatas.

Sasaran 5 ***Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat***

Untuk mencapai Target Realisasi Sasaran 5 (Lima) “ Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” telah ditetapkan Program-program dan Anggaran Sebagai berikut:

Tabel III.38
Program dan Anggaran pendukung Sasaran 5 (Lima) “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat”

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	786.187.265
2.	Program Pemasaran Pariwisata	954.034.932
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	674.183.762
4.	Program Pengembangan Umkm	44.340.060
5.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	80.968.067
6.	Program Pengembangan Ekspor	54.994.500
7.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	357.527.789
8.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	369.817.943
9.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.063.224.653
10.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	184.994.827
11.	Program Penyuluhan Pertanian	492.344.615
12.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.541.823.436
13.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	210.615.064
14.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	451.213.593
15.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	170.612.265

16.	Program Pengelolaan Pendidikan	37.858.113.324
17.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	324.705.714
18.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	52.693.913.678
19.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	4.675.149.581
20.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.509.318.100
21.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.472.716.400
22.	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	722.332.090
23.	Program Penanggulangan Bencana	604.744.029
24.	Program Pemberdayaan Sosial	199.987.461
25.	Program Rehabilitasi Sosial	473.879.965
26.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	367.284.334
27.	Program Penanganan Bencana	85.111.644
28.	Program Perlindungan Perempuan	431.804.436
29.	Program Perlindungan Khusus Anak	570.864.100
30.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	170.612.265
31.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	31.908.000
32.	Program Pendaftaran Penduduk	189.739.865
33.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	1.676.804.592
34.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.249.857.703
35.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	195.671.513
36.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	434.339.907
	Total	115.375.741.472

Untuk mengetahui hasil pencapaian sasaran 5 (Lima) maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menetapkan 4 (Empat) Indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel III.39
Capaian Kinerja Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

No	Indikator Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023			Target Tahun 2026 (Akhir RPJMD)
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target
1.	Pertumbuhan Ekonomi	3	5,18	172,67	3,18	5,35	168,24	5
2.	Indeks Gini Ratio	0,34	0,37	91,18	0,34	0,324	104,71	0,34

3	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,1	6,19	98,52	6	5,35	110,83	6
4.	Persentase Angka Kemiskinan	5,6	5,85	95,54	5,6	5,80	96,43	5,4

Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dengan 4 Indikator sasaran pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2023 terhadap Pertumbuhan ekonomi, dari target Pertumbuhan Ekonomi yang di tetapkan sebesar 3,18% dengan Realisasi **5,35%** sehingga persentase capaiannya adalah **168,24% (Kinerja Sangat Tinggi)**, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2023 terhadap Pertumbuhan ekonomi, dari target Pertumbuhan Ekonomi yang di tetapkan sebesar 3,18% dengan Realisasi **5,35%** sehingga persentase capaiannya adalah **168,24% (Kinerja Sangat Tinggi)**, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Berikut ini pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019-2023, dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel III.40
Pertumbuhan Ekonomi

URAIAN Pertumbuhan Ekonomi	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Bolaang Mongondow Timur	4,8 %	0,18 %	3,05 %	5,18%	5,35%
Prop. Sulawesi Utara	5,65%	-0,99%	4,16 %	5,42%	5,48%
Nasional	-	-		5,31%	5,05%

Sumber: BPS sulut, 2024

Dari tabel diatas menunjukkan kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengalami penurunan pada saat Pandemi covid-19 yaitu Tahun 2020. Kemudian tahun 2021 mengalami pertumbuhan 3,05% dan terjadi peningkatan di tahun 2022 5,18% dan tahun 2023 5,35%. Apabila di dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi utara sebesar 5,48% Kabupaten Bolaang Mongondow Timur masih di bawah

provinsi dan jika dibandingkan dengan nasional pertumbuhan ekonomi Boltim masih di atas rata-rata nasional.

Penyebab capaian kinerja pada indikator pertumbuhan ekonomi tercapai adalah:

- a. Kemudahan pengurusan ijin usaha bagi pelaku usaha;
- b. Pelaksanaan program-program dibidang pertanian dan perikanan yang dapat menyerap banyak tenaga kerja;
- c. Mengkenalkan produk-produk yang dihasilkan melalui berbagai media dan kegiatan;

Indikator Sasaran Pertumbuhan Ekonomi didukung oleg program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, program pemasaran pariwisata, program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, program pengembangan UMKM, program peningkatan sarana distribusi perdagangan, program pengembangan ekspor, program perencanaan dan pembangunan industry, program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, program penyuluhan pertanian, program pengelolaan perikanan tangkap, program pengelolaan perikanan budidaya, program pengendalian pelaksanaan penanaman modal, program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dengan anggaran Rp. 7.436.882.771 dan terealisasi sebesar Rp. 6.449.835.812 atau sebesar 86,73 sehingga terjadi penghematan sebesar 13,27%. Indikator ini didukung oleh beberapa perangkat daerah dan dengan jumlah sumber daya yang terbatas namun berkompeten.

2. Indeks Gini Ratio

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting untuk mengukur pemerataan pendapatan masyarakat pada suatu daerah. gini ratio merupakan ukuran pemerataan pendapatan yang juga merefleksikan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat.

$$\text{Rumus Gini Ratio: } GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$$

Ket : f_i = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i .

Y_i = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i .

Nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu.

Bila $GR = 0$, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya.

Bila $GR = 1$ artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja. Semakin tinggi Indeks Gini, semakin besar pula ketimpangan yang ditunjukkan. Ini artinya, penduduk dengan *income* tinggi akan menerima angka persentase yang jauh lebih tinggi pula dari total *income* seluruh penduduk.

Gini rasio memiliki nilai antara 0 dan 1 (digunakan dalam bahasan ini), berdasarkan nilai Gini rasio, terdapat 3 (tiga) kelompok ketimpangan, tinggi jika koefisien gini bernilai 0,50 atau lebih, sedang jika nilainya diantara 0,36-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,36.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2023 terhadap Indeks Gini Ratio, dari target yang di tetapkan sebesar 0,34 realisasi adalah **0,324** sehingga persentase capaiannya **104,71 (Kinerja Sangat Tinggi)** capaian melebihi target yang diperjanjikan. Jila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 di tahun 2023 artinya capaian kinerja meningkat dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian RPJMD sudah tercapai dan diharapkan ditahun-tahun kedepan dapat ditingkatkan..

Perkembangan disparitas (Indeks Gini) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel III.41
Indeks Gini Ratio Kab. Bolaang Mongondow Timur tahun 2019-2023

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Gini Ratio	0,35	0,34	0,37	0,37	0,324
Provinsi Sulut				0,365	0,370
Nasional				0,381	0,388*

Indeks Gini Ratio Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dari tahun 2019 0,35 turun menjadi 0,34 di tahun 2020 artinya kinerja meningkat dan di tahun 2021 dan 2022 0,37 artinya capaian kinerja menurun sedangkan di tahun 2023 0,324 yang artinya capaian kinerja kembali meningkat.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulut 0,370 dan nasional 0,388 menunjukkan ketimpangan pendapatan di tahun 2023 lebih tinggi Provinsi Sulut dan nasional dari Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Beberapa faktor penyebab keberhasilan indikator ini adalah:

- a. Melakukan sosialisasi akan pentingnya pendidikan dan kesehatan dikalangan masyarakat;
- b. Menurunnya angka pengangguran;
- c. Peningkatan anggaran program pemerintah yang dapat meringankan beban masyarakat miskin;
- d. Peningkatan sarana pada sektor pertanian yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru.

Indikator Sasaran Indeks Gini Ratio didukung oleh program pengelolaan pendidikan, program pendidik dan tenaga kependidikan, program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan anggaran Rp. 90.876.732.716 dan terealisasi Rp. 78.083.864.891 atau sebesar 85,92% sehingga terjadi penghematan sebesar 14,08%. Indikator ini juga didukung oleh sumber daya manusia yang terbatas namun berkompeten.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka terjadi saat seseorang tidak memiliki pekerjaan atau tidak sedang bekerja sama sekali dengan berbagai sebab. Salah satunya adalah tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki jumlah pencari kerja di tahun 2023 sebanyak 590 pencari kerja terdiri dari 460 laki-laki dan 130 perempuan.

Berdasarkan data BPS (Boltim dalam angka 2024), dari jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin adalah 46.006 dengan

jumlah laki-laki 30.028 dan perempuan 15.978. Untuk mengetahui tingkat pengangguran terbuka digunakan rumus:

FORMULASI PENGUKURAN :

$$\text{TPT} = (\text{JUMLAH PENGANGGURAN} / \text{JUMLAH ANGKATAN KERJA}) * 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2023 terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, dari target yang ditetapkan sebesar 6% dengan Realisasi sebesar **5,35%**, dengan persentase capaiannya **110,83% (Kinerja Sangat Tinggi)**. Capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Salah satu faktor penyebab tercapainya indikator ini adalah mudahnya pengurusan ijin usaha untuk menambah lapangan pekerjaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah ketersediaan lapangan pekerjaan yang perlu ditingkatkan sehingga solusi yang dilakukan adalah mempermudah ijin usaha untuk membuka lapangan usaha. Selain itu keterbatasan anggaran menjadi permasalahan yang dihadapi sehingga di tahun 2023 tidak ada kegiatan sosialisasi pelatihan kerja dan produktivitas kerja. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 maka tahun 2023 mengalami penurunan angka pengangguran artinya kinerja meningkat, dan Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian tahun 2023 telah mencapai target RPJMD namun perlu upaya untuk terus menurunkan angka pengangguran sehingga tahun-tahun kedepan angka pengangguran di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur semakin menurun.

Berikut ini Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019-2023, Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 dan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel III.42
Tingkat Pengangguran Terbuka

URAIAN TPT	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Bolaang Mongondow Timur	6,07 %	6,13 %	5,99 %	6,19	5,35
Prop. Sulawesi Utara	6,01%	7,37	7,06 %	6,61	6,10
Nasional	-	-	-	5,86	5,32

Sumber: BPS 2023-2024

Dari tabel diatas menunjukkan kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2019-2023, mengalami peningkatan angka pengangguran ditahun 2020 dan tahun 2022 atau capaian kinerja menurun. Tetapi di tahun 2023 terjadi penurunan angka pengangguran atau capaian kinerja meningkat. Apabila dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Utara sebesar 6,10% dan Nasional sebesar 5,32%, maka Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bolaang Mongondow timur masih di bawah rata-rata provinsi dan diatas rata-rata nasional.

Agar sasaran kinerja dapat mencapai target sasaran RPJMD, diperlukan perbaikan kinerja sebagai rekomendasi untuk tahun yang akan datang, yaitu:

- a. Membuka lapangan usaha untuk menurunkan jumlah pengangguran dengan mempermudah ijin usaha;
- b. Pelaksanaan program-program pelatihan kerja yang dapat menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan mampu menjadi wirausaha baru;
- c. Menjalin hubungan industrial yang kondusif guna mengurangi angka perselisihan hubungan industrial yang berdampak pada PHK,
- d. Menyelenggarakan bursa kerja, baik bursa kerja terbuka maupun bursa kerja khusus;
- e. Mendorong pelaksanaan program kegiatan padat karya yang dapat menyerap dan memperkerjakan tenaga kerja secara masal, terutama dalam anggaran Dana Desa.

Indikator tingkat pengangguran terbuka tidak didukung oleh anggaran untuk peningkatan ketrampilan melalui kegiatan sosialisasi pelatihan kerja dan ketersediaan sumber daya yang terbatas sehingga kedepannya diupayakan untuk dapat dilaksanakan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan para pencari kerja.

4. Persentase Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Berdasarkan Permensos Nomor 146 Tahun 2013 tentang penetapan kriteria dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu bahwa terdapat beberapa criteria seseorang dinyatakan sebagai penduduk miskin atau tidak mampu, yaitu :

- a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
- b. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
- c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
- d. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam setahun untuk setiap anggota rumah tangga;
- e. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- f. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
- g. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- h. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah;

- i. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran
- j. Luas lantai rumah kecil (kurang dari 8 m²/orang); dan
- k. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

Apabila mengacu pada kriteria fakir miskin di atas, maka dapat disimpulkan penanganan fakir miskin bersifat multisektor yang perlu melibatkan berbagai dinas dan lembaga terkait pada bidang ekonomi, infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Menurut data BPS (Boltim Dalam Angka 2023/2024) Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2023 adalah 4.320 penduduk.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2023 terhadap Persentase Angka Kemiskinan, dari target yang di tetapkan sebesar 5,6% dengan Realisasi sebesar **5,80%**. Presentase capaiannya **96,43% (Kinerja Sangat Tinggi)**. Capaian ini tidak sesuai target yang diperjanjikan. Hambatan yang dialami dalam pencapaian indikator ini adalah masi adanya pengangguran, persentase rumah layak huni di tahun 2023 adalah 85,53 sehingga masih terdapat penduduk yang tinggal di rumah tidak layak.

Berikut ini Persentase Angka Kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Provinsi Tahun 2019-2023 dan Persentase Angka Kemiskinan Nasional sebagai berikut:

Tabel III.43
Presentase Angka Kemiskinan

URAIAN Persentase Angka Kemiskinan	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Bolaang Mongondow Timur	6,1 %	5,88 %	6,1 %	5,85	5,80
Prop. Sulawesi Utara	-	-	7,36 %	7,28	7,38
Nasional	-	-	-	9,57	9,36

Sumber: BPS sulut, 2024

Dari tabel diatas menunjukkan Persentase Angka Kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 5 (Lima) tahun terakhir masih relative cukup tinggi di sebabkan pandemic covid-19, lapangan kerja yang kurang serta pembangunan yang belum merata. tahun 2018 6,3%, tahun 2019 turun menjadi 6,1%, tahun 2020 mengalami penurunan lagi menjadi 5,88%. Kemudian tahun 2021 kembali mengalami kenaikan menjadi 6,1% dan di tahun 2022 turun menjadi 5,85%. Apabila di dibandingkan dengan Persentase Angka Kemiskinan Sulawesi utara sebesar 7,28% dan Nasional sebesar 9,57%, maka persentase angka kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow timur masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional.

Agar sasaran kinerja dapat mencapai target sasaran, diperlukan perbaikan kinerja sebagai rekomendasi untuk tahun yang akan datang, yaitu:

- a. Pelaksanaan program lintas sektoral yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi;
- b. Percepatan program penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- c. Peningkatan program bantuan sosial sebagai program stimulus bagi pengentasan kemiskinan secara menyeluruh.

Indikator Sasaran Persentase Angka Kemiskinan di dukung oleh program pengelolaan pendidikan, program pendidik dan tenaga kependidikan, program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum, program pengelolaan dan pengembangan system air limbah, program pengembangan sisten dan pengelolaan persampahan regional, program penanggulangan bencana,

program pemberdayaan social, program rehabilitasi social, program perlindungan dan jaminan social, program penanganan bencana, program perlindungan perempuan, program perlindungan khusus anak, program peningkatan disertifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, program penanganan kerawanan pangan, program pendaftaran penduduk, program pembinaan keluarga berencana, program pengembangan kapasitas daya saing, program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, program pengelolaan perikanan tangkap, program pengelolaan perikanan budidaya, program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, program penyuluhan pertanian, program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, dan program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan anggaran Rp 111.339.647.024 dan terealisasi Rp. 97.184.301.044 atau sebesar Rp. 87,29% sehingga terjadi penghematan sebesar 12,71%. Indikator ini didukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah yang terbatas.

Sasaran 6 **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**

Untuk mencapai Target Realisasi Sasaran 6 (Enam) “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” telah ditetapkan Program-program dan Anggaran Sebagai berikut:

Tabel III.44
Program dan Anggaran pendukung Sasaran 6 (Enam) “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	353.086.891
2.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	15.450.000
3.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	2.870.000
4.	Program Pengelolaan Persampahan	413.997.962
	Total	785.404.853

Untuk mengetahui hasil pencapaian sasaran 6 (Enam) maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menetapkan 1 (Satu) Indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel III.45
Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023			Target Tahun 2026 (Akhir RPJMD)
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,88	82,41	121,41	68,29	83,08	121,66	68,70

Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan 1(satu) Indikator sasaran pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Relasi manusia dan lingkungan merupakan hubungan yang saling timbal balik karena manusia hidup di alam lingkungan hidup dan alam sebagai lingkungan hidup juga membutuhkan manusia untuk pelestariannya. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan tahun tertentu. Tujuan digunakannya indikator ini adalah sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada publik terkait pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Untuk mengukur dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat dihitung dengan Rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{IKLH Kab.} &= (\text{IKA} \times 0.376) + (\text{IKU} \times 0.405) + (\text{IKTL} \times 0.219) \\
 &= (65.00 \times 0.376) + (97.24 \times 0.405) + (86.02 \times 0.219) \\
 &= \mathbf{83.08}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2023 terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dari target yang ditetapkan sebesar 68,29 dengan Realisasi sebesar **83,08%**. Presentase capaiannya **121,66% (Kinerja Sangat Tinggi)**. Capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 maka terjadi peningkatan kinerja di tahun 2023 dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian kinerja tahun 2023 telah mencapai target kinerja RPJMD.

Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel III. 46
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab. Bolaang Mongondow Timur
Tahun 2019-2023

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	N/A	78,04	82,41	82,41	83,08

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tahun 2019 tidak ada realisasi penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Data perhitungan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020 atas Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Bolaang Mongondow Timur sangat tinggi yaitu pada angka 78,04, dan pada tahun 2021 dan tahun 2022 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengalami peningkatan menjadi 82,41 dan meningkat lagi di tahun 2023 menjadi 83,08

Faktor pendorong tercapainya target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P dalam rencana pembangunan kabupaten;
- b. Optimalnya perencanaan Lingkungan Hidup,
- c. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup,

- d. Meningkatnya pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan Hidup PPLH,
- e. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan,
- f. Mengoptimalkan Penanganan Pengaduan lingkungan Hidup.

Agar sasaran kinerja dapat lebih ditingkatkan walaupun capaian kinerja telah melebihi target yang diperjanjikan, diperlukan perbaikan kinerja sebagai rekomendasi untuk tahun yang akan datang yaitu dilakukan publikasi informasi kepada masyarakat tentang kondisi udara sebagai upaya meningkatkan kepedulian lingkungan dan mendorong masyarakat dalam melakukan penghijauan.

Indikator Sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup didukung oleh program perencanaan lingkungan hidup, program pengendalian dan/atau kerusakan lingkungan hidup, program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan program pengelolaan persampahan dengan anggaran Rp. 785.404.853 dan terealisasi sebesar Rp. 690.066.700 atau sebesar 87,86% sehingga terjadi penghematan sebesar 12,14% dan indikator ini didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan dengan jumlah yang terbatas.

Sasaran 7
Meningkatnya Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat

Untuk mencapai Target Realisasi Sasaran 7 (Tujuh) “Meningkatnya Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat” telah ditetapkan Program-program dan Anggaran Sebagai berikut:

Tabel III.47
Program dan Anggaran pendukung Sasaran 7 (Tujuh) “Meningkatnya Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat”

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	52.693.913.678
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.563.117.302
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan	300.705.850

	Makanan Minuman	
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	4.675.149.581
5.	Program Pengelolaan Pendidikan	37.858.113.324
6.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	324.705.714
	Total	99.415.705.449

Untuk mengetahui hasil pencapaian sasaran 7 (Tujuh) maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menetapkan 4 (Empat) Indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel III.48
Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat

No	Indikator Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023			Target Tahun 2026 (Akhir RPJMD)
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target
1.	Prevalensi Stunting	6	6,99	83,50	6	3,86	135,67	6
2.	Rata-Rata lama Sekolah (Tahun)	9,90	8,09	81,72	10,90	8,27	75,87	12,00
3.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,61	11,88	102,33	11,63	11,90	102,32	11,69
4.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	68,89	68,24	99,06	69,89	68,51	98,03	70,00

Sasaran Meningkatnya Kualitas kesehatan dan Pendidikan Masyarakat dengan 4 (Empat) Indikator sasaran pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Prevalensi Stunting

Pemerintah pusat selalu mendorong pemerintah daerah untuk dapat menekan angka prevalensi stunting. Stunting bukan hanya urusan tinggi badan tetapi juga rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan munculnya penyakit-penyakit kronis.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2023 terhadap Prevalensi Stunting, dari target yang di tetapkan sebesar **6%** dengan Realisasi sebesar **3,86%**. Presentase **135,67% (kinerja sangat tinggi)**. Capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun

2022 prevalensi stunting mengalami penurunan atau capaian kinerja meningkat, dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD adalah 6 maka telah mencapai target RPJMD.

Perkembangan Prevalensi Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel III.49
Prevalensi Stunting Kab. Bolaang Mongondow Timur tahun 2019-2023

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Prevalensi Stunting	7,59%	6,51%	8,45%	6,99%	3,86%

Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2023

Dari tabel diatas menunjukkan Angka Harapan Hidup (Tahun) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 5 (Lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Angka Harapan Hidup selama 68,51 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mempunyai makna bahwa secara rata-rata bayi yang baru lahir pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan usia 68,51 Tahun. Walaupun demikian Angka Harapan Hidup Bolaang Mongondow Timur masih dibawah provinsi dan nasional.

Faktor penyebab tercapainya indikator ini adalah:

- a. Melakukan kegiatan Rembuk Stunting yaitu tindak lanjut aksi konvergensi intervensi penurunan stunting;
- b. Melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kementerian Agama Kab Boltim, Dinas Kesehatan/TPPS Boltim dan FKUB Boltim terkait bimbingan perkawinan, screening layak nikah bagi calon pengantin dan peran tokoh agama dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- c. Peningkatan pelayanan Pustu dan Posyandu di tiap Desa agar dapat memantau perkembangan gizi setiap balita dan ibu hamil yang ada di Desa;
- d. Peningkatan pelaksanaan program pangan bergizi bagi balita dan ibu hamil serta menyusui terus di tingkatkan oleh Pemerintah Daerah;

Hambatan dalam pencapaian stunting adalah pemahaman orangtua dalam pemenuhan gizi anak dan solusi yang dilakukan dengan cara memberikan pemahaman tentang pentingnya pemberian makanan bergizi dan gaya hidup sehat.

Indikator Sasaran Prevalensi Stunting didukung oleh program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan anggaran Rp. 1.981.957.720 dan terealisasi Rp. 1.474.923.800 atau 74,42% sehingga terjadi penghematan sebesar 25,58%. Indikator ini didukung oleh sumber daya manusia yang jumlahnya terbatas atau masih membutuhkan tenaga kesehatan.

2. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah 9 tahun dan tamat SMA diperhitungkan lama sekolah 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Berdasarkan angka rata-rata lama sekolah dapat diperoleh gambaran tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah. Rata-rata lama sekolah akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan jumlah pengangguran. Diharapkan dengan meningkatnya angka rata-rata lama sekolah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan angka kemiskinan dan jumlah pengangguran.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2023 terhadap Rata-rata lama sekolah (Tahun), dari target yang ditetapkan sebesar 10,90 dengan Realisasi sebesar **8,27**. Persentase capaiannya **75,87% (Kinerja Cukup)**. Capaian kinerja ini tidak sesuai dengan target yang diperjanjikan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 8,09 maka terjadi peningkatan kinerja sebesar 0,18 dan jika dibandingkan dengan target RPJMD 12,00 maka perlu peningkatan kinerja untuk mencapai target RPJMD.

Perkembangan Rata-rata lama sekolah (Tahun) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel III.50
Rata-rata lama sekolah (Tahun) di Kab. Bolaang Mongondow Timur
Tahun 2019-2023

URAIAN Rata-rata lama sekolah (tahun)	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Bolaang Mongondow Timur	7,59	7,83	7,93	8,09	8,27
Prop. Sulawesi Utara	9,43	9,49	9,62	9,68	9,77
Nasional	-	-	-	8,69	8,77

Sumber: BPS sulut, 2024

Dari tabel diatas menunjukkan Rata-Rata lama Sekolah (Tahun) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 5 (Lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sangat mempengaruhi capaian kinerja indikator ini. Apabila di dibandingkan dengan Tingkat Rata-Rata lama Sekolah (Tahun) di Sulawesi utara sebesar 9,68 dan Nasional sebesar 8,69, maka Tingkat Rata-Rata lama Sekolah (Tahun) di Kabupaten Bolaang Mongondow timur masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional.

Faktor yang menjadi penghambat tercapainya indikator rata-rata lama sekolah adalah:

- a. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan;
- b. Masih adanya penduduk miskin yang mengakibatkan anak usia sekolah menjadi putus sekolah sehingga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan;
- c. Pengaruh buruk dikalangan anak usia sekolah untuk tidak melanjutkan pendidikan;

Solusi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk meningkatkan capaian rata-rata lama sekolah adalah:

- a. Pemberian pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan melalui sosialisasi;
- b. Melakukan monitoring terhadap sarana pendidikan untuk terus ditingkatkan;

- c. Mengikutsertakan tenaga pendidik pada kegiatan peningkatan kompetensi dan keahlian.

Indikator Sasaran Rata-Rata Lama Sekolah didukung oleh program pengelolaan pendidikan dan program pendidik dan tenaga kependidikan dengan anggaran Rp. 38.182.819.038 dan terealisasi Rp. 36.206.860.966 atau sebesar Rp. 94,83% sehingga terjadi penghematan sebesar 5,17%. Indikator ini didukung oleh sumber daya manusia yang jumlahnya terbatas atau jumlah tenaga pendidik di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur masih kurang.

3. Harapan Lama Sekolah (Tahun)

Pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara kesatuan Republik Indonesia, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang maka digunakan harapan lama sekolah untuk menunjukkan lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai setiap anak. Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator makro yang perhitungannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS). Formulasi perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$EYS'_a = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E'_i}{P'_i}$$

Dimana:

EYS'_a	: Harapan lama sekolah pada umur a di tahun t ;
E'_i	: Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t ;
P'_i	: Jumlah penduduk usia i pada tahun t ;
i	: Usia ($a, a+1, \dots, n$);
FK	: Faktor koreksi.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2023 terhadap Harapan lama sekolah (Tahun), dari target yang ditetapkan sebesar 11,63 dengan Realisasi sebesar **11,90**, persentase capaiannya **102,32% (Kinerja Sangat Tinggi)**. Capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Walaupun capaian ini sangat tinggi namun jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Utara yaitu 12,96 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur perlu

berupaya untuk meningkatkan capaian indikator harapan lama sekolah. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 11,88 maka terjadi peningkatan kinerja di tahun 2023 yaitu 11,90, dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka realiasi tahun 2023 telah mencapai target RPJMD.

Perkembangan Harapan lama sekolah (Tahun) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel III. 51
Harapan lama sekolah (Tahun) di Kab. Bolaang Mongondow Timur
Tahun 2019-2023

URAIAN Harapan lama sekolah (tahun)	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Bolaang Mongondow Timur	11,50	11,59	11,86	11,88	11,90
Prop. Sulawesi Utara	-	-	-	12,95	12,96
Nasional	-	-	13,08	-	13,15

Sumber: BPS sulut, 2024

Dari tabel diatas menunjukkan Harapan lama Sekolah (Tahun) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 5 (Lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Utara dan nasional maka harapan lama sekolah Boltim dibawah provinsi dan nasional. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan harapan lama sekolah dengan cara memberikan beasiswa dan peningkatan sarana pendidikan serta peningkatan kemauan anak-anak di Boltim untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Faktor pendorong tercapainya target Harapan lama Sekolah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memberikan bantuan pendidikan kepada masyarakat kurang mampu;
- b. Memberikan sosialisasi tentang pentingnya melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- c. Melakukan pendataan kepada anak putus sekolah untuk selanjutnya dilakukan pembinaan;
- d. Sarana prasaran pendidikan sang semakin baik.

Indikator Sasaran Harapan Lama Sekolah didukung oleh program pengelolaan pendidikan dan program pendidik dan tenaga kependidikan dengan anggaran Rp. 38.182.819.038 dan terealisasi Rp. 36.206.860.966 atau sebesar Rp. 94,83% sehingga terjadi penghematan sebesar 5,17%. Indikator ini didukung oleh sumber daya manusia yang jumlahnya terbatas atau jumlah tenaga pendidik di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur masih kurang.

4. Angka Harapan Hidup (Tahun)

Keberhasilan program kesehatan dan pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan angka harapan hidup penduduk. Angka Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2023 terhadap Angka Harapan Hidup (Tahun), dari target yang ditetapkan sebesar 69,89 dengan Realisasi sebesar **68,51**, persentase capaiannya **98,03% (Kinerja Sangat Tinggi)**. Capaian ini tidak sesuai target yang diperjanjikan.

Realisasi tahun 2023 indikator angka harapan hidup adalah 68,51 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 adalah 68,24 mengalami kenaikan capaian kinerja, dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu 70,00 maka perlu upaya untuk meningkatkan capaian kinerja.

Perkembangan Angka Harapan Hidup (Tahun) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel III.52
Angka Harapan Hidup (Tahun) di Kab. Bolaang Mongondow Timur
Tahun 2019-2023

URAIAN Angka Harapan Hidup (tahun)	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Bolaang Mongondow Timur	67,81	67,89	67,94	68,24	68,51
Provinsi. Sulawesi Utara	71,58	71,69	71,76	72,08	72,40
Nasional	-	-	-	71,85	73,93

Sumber: BPS sulut, 2024

Dari tabel diatas menunjukkan Angka Harapan Hidup (Tahun) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 5 (Lima) tahun terakhir terus mengalami

peningkatan. Angka Harapan Hidup selama 68,51 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mempunyai makna bahwa secara rata-rata bayi yang baru lahir pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan usia 68,51 Tahun. Walaupun demikian Angka Harapan Hidup Bolaang Mongondow Timur masih dibawah provinsi dan nasional.

Solusi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian sasaran kinerja sehingga mencapai target yang diperjanjikan, diperlukan perbaikan kinerja sebagai rekomendasi untuk tahun yang akan datang, yaitu:

- a. Meningkatkan upaya pencegahan kematian ibu dan bayi baru lahir melalui serangkaian program dan kegiatan;
- b. Meningkatkan pelayanan kesehatan pada seluruh puskesmas baik tenaga kesehatan dan sarana atau alat kesehatan;
- c. Memberikan pemahaman atau sosialisasi kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kalori;
- d. Memperbaiki status gizi keluarga;
- e. Melakukan program sosial khususnya kesehatan lingkungan.

Indikator Sasaran Angka Harapan hidup didukung oleh program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dengan anggaran Rp. 61.232.886.411 dan terealisasi Rp. 49.699.092.116 atau sebesar Rp. 81.16 sehingga terjadi penghematan sebesar 18,84%. Indikator ini didukung oleh sumber daya manusia yang jumlahnya masi terbatas atau masih membutuhkan tenaga kesehatan.

Sasaran 8
Meningkatkan Pelayanan Anak dan Kesetaraan Gender

Untuk mencapai target realisasi sasaran 8 (delapan) “Meningkatkan Pelayanan Anak dan Kesetaraan Gender” telah ditetapkan program dan anggaran sebagai berikut:

Tabel III.53
Program dan Anggaran Pendukung Sasaran 8 (Delapan) “Meningkatkan Pelayanan Anak dan Kesetaraan Gender”

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Perlindungan Perempuan	431.804.436
	Total	431.804.436

Untuk mengetahui hasil pencapaian sasaran 8 (Delapan) maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menetapkan 2 (Dua) Indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel III.54
Capaian Kinerja Meningkatkan Pelayanan Anak dan Kesetaraan Gender

No	Indikator Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023			Target Tahun 2026 (Akhir RPJMD)
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,90	91,10	100,22	90,95	91,22	100,30	91,00
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,00	70,13	94,77	76,00	70,10	92,24	78,00

Cat: realisasi capaian menggunakan data sementara dari DPPA Boltim

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu indikator hasil pengembangan dari penghitungan IPM. Baik metodologi maupun konsep definisi yang dipakai dalam penghitungan IPG sama dengan penghitungan IPM, tetapi dihitung menurut perhitungan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki dikalikan 100.

Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, berimplikasi kepada pembangunan perempuan. Metodologi dalam penghitungan IPG, umur harapan

hidup yang dihitung dibedakan menurut jenis kelamin termasuk angka harapan sekolah dan rata-rata lama. Demikian pula, pengeluaran per kapita per Tahun juga membandingkan pengeluaran yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Seluruh indikator yang sudah dipisahkan menurut jenis kelaminnya, akan diperoleh IPM laki-laki dan IPM perempuan. IPG merupakan perbandingan IPM perempuan terhadap IPM laki-laki.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2023 terhadap Indeks Pembangunan Gender, dari target yang ditetapkan sebesar 90,95 dengan Realisasi sebesar **91,22**. Presentase capaiannya **100,30% (Kinerja Sangat Tinggi)**. Capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dengan realisasi 91,10 maka terjadi peningkatan dan jika dibandingkan dengan target RPJMD capaiannya melebihi yang ditargetkan.

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel III. 55
Indeks Pembangunan Gender di Kab. Bolaang Mongondow Timur
Tahun 2019-2023

URAIAN Indeks Pembangunan Gender	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Bolaang Mongondow Timur	90,75	90,84	90,98	91,10	91,22
Prop. Sulawesi Utara	-	-	94,42	94,89	-
Nasional	-	-	94,61	-	-

Sumber: BPS sulut, 2023 dan DPPPA

Dari tabel diatas Perkembangan Capaian IPG di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama ini menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Selama 5 tahun terkakhir selalu mengalami kenaikan. Pada Tahun 2019 angkanya mencapai 90,75, kemudian terus meningkat di setiap tahunnya dan menjadi 91,22 pada Tahun 2023.

Agar sasaran kinerja dapat ditingkatkan, diperlukan perbaikan kinerja sebagai rekomendasi untuk tahun yang akan datang, yaitu:

- a. Mendorong pemenuhan hak anak yang sama dalam hal pendidikan baik untuk anak laki-laki maupun perempuan;
- b. Mencegah terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak;
- c. Program kegiatan yang berhubungan dengan Pembangunan Gender harus di dukung oleh anggaran Pemerintah Daerah.
- d. Pelaksanaan sosialisasi dan peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang pembangunan gender;
- e. Dibentuknya wadah perempuan agar mampu merepresentasikan kehadiran serta menyuarakan aspirasi perempuan di level kebijakan pemerintah.

Indikator Sasaran Indeks Pembangunan Gender (IPG) didukung oleh program perlindungan perempuan dengan anggaran Rp. 431.804.436 dan terealisasi Rp. 420.471.511 atau sebesar 97,38% sehingga terjadi penghematan sebesar 2,62%. Indikator ini didukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah yang terbatas.

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

Indeks Pemberdayaan Gender selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan.

Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan untuk berkembang, keluar dari kemiskinan dan menjalankan pemerintahan dengan efektif. Dengan mengupayakan kesetaraan gender akan menjadikan strategi penting dalam pembangunan untuk memberdayakan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2023 terhadap Indeks Pemberdayaan Gender, dari target yang di tetapkan sebesar **76,00** dengan Realisasi sebesar **70,10**. Presentase capaiannya **92,24% (Kinerja Sangat Tinggi)**. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dengan realisasi 70,13 maka terjadi penurunan 0,03 dan jika dibandingkan dengan target RPJMD yaitu 78,00 maka capaian tahun 2023 belum mencapai target RPJMD .

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel III.56
Indeks Pemberdayaan Gender di Kab. Bolaang Mongondow Timur
Tahun 2019-2023

URAIAN Indeks Pemberdayaan Gender	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Bolaang Mongondow Timur	73,06	72,48	70,59	70,13	70,10
Prop. Sulawesi Utara	-	-	-	78,99	
Nasional	-	-	-	-	-

Sumber: BPS sulut 2022 dan DPPP Boltim 2023

Dari tabel diatas perkembangan capaian IDG di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Untuk tahun 2023 menggunakan angka perkiraan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu 70,10 karena belum ada data dari BPS. Capaian tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan Provinsi dan nasional karena belum dirilisnya Indeks Pembangunan Gender Tahun 2023.

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indikator ini adalah adanya ketimpangan gender menyebabkan kurangnya peran dan keterlibatan perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Solusi untuk mencapai sasaran kinerja dapat mencapai target sasaran, diperlukan perbaikan kinerja sebagai rekomendasi untuk tahun yang akan datang, yaitu:

- a. Perencanaan dan anggaran pendukung Pemberdayaan Gender harus di tingkatkan;
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melibatkan perempuan dalam proses pembangunan;
- a. Memberdayakan perempuan melalui pelatihan-pelatihan atau sosialisasi untuk dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri.

Indikator Sasaran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) didukung oleh program perlindungan perempuan dengan anggaran Rp. 431.804.436 dan terealisasi Rp. 420.471.511 atau sebesar 97,38% sehingga terjadi

penghematan sebesar 2,62%. Indikator ini didukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah yang terbatas.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2023 sebagai komponen utama atas pencapaian dan sasaran pelaksanaan kinerja Pemerintah daerah.

Pada Tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023. Adapun jumlah belanja pada APBD Tahun 2023 direncanakan sebesar **Rp 491.359.703.372,-** (Empar ratus Sembilan puluh satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua), dan hingga selesainya tahun anggaran terealisasi sebesar **Rp. 442.183.632.593,77** (Empar ratus empat puluh dua miliar seratus delapan puluh tiga enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga) dengan persentase capaian 89,99%.

Adapun pagu anggaran untuk pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.57
Pagu dan Realisasi Anggaran
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Per Sasaran Strategis Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Rencana	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan SDM	9.792.196.665	8.443.488.889	86,23
2.	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	6.272.467.437	3.232.284.371	51,53
3.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kunjungan Wisata	7.010.728.426	6.110.343.239	87,16

4.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	56.147.667.117	55.080.893.380	98,10
5	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	115.375.741.472	100.616.716.365	87,21
6.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	785.404.853	690.066.700	90,24
7.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat	99.415.705.449	85.905.953.082	86,41
8.	Meningkatkan Pelayanan Anak dan Kesetaraan Gender	431.804.436	420.471.511	97,38

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.58
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Presentase rata-rata kinerja sasaran	Anggaran	
				Realisasi (Rp)	%
A	Misi I		(99,78%)		
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan SDM	6	99,56%	8.443.488.889	86,23
2.	Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	1	100%	3.232.284.371	51,53
B	Misi II		(129,12%)		
3.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kunjungan Wisata	3	129,12%	6.110.343.239	87,16
C	Misi III		(109,04%)		
4.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	6	104,26%	55.080.893.380	98,10
5.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	4	120,05%	100.616.716.365	87,21
6.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	121,66%	690.066.700	90,24

7.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat	4	102,97%	85.905.953.082	86,41
8.	Meningkatkan Pelayanan Anak dan Kesetaraan Gender	2	96,27%	420.471.511	97,38

Dilihat dari rata-rata persentase capaian indikator sasaran Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di tahun 2023 melebihi target 100% atau tepatnya sebesar 112,65%. Sedangkan realisasi anggaran hanya mencapai 89,99%. Artinya, meskipun ada penghematan dari sisi anggaran, tapi rata-rata target indikator kinerja telah tercapai. Walaupun rata-rata capaian kinerja telah tercapai tetapi terdapat beberapa indikator yang perlu peningkatan kinerja dan dukungan anggaran. Kedepannya penggunaan anggaran bisa lebih diprioritaskan untuk target prioritas yang belum tercapai agar semua target sesuai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam RPJMD 2021-2026 dapat tercapai dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi indikator dan komitmen bagi Pemerintah untuk bersama-sama menciptakan *Good Governance* serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2023 disusun sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran, disamping itu juga dapat dijadikan sebagai umpan balik dalam hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan barometer dalam pengukuran kinerja satuan kerja perangkat daerah, untuk melihat sejauh mana kemampuan *stakeholder/* seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja instansi pemerintah yaitu dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar rencana atau target yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2023. Hasil pengukuran dan capaian tersebut tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan gerakan perubahan system birokrasi dan pelayanan publik yang semakin diperbaiki untuk mencapai hasil yang maksimal, dimana LKjIP ini menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah untuk melihat sejauh mana kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan LKjIP ini Pemerintah Daerah dapat melihat target-target prioritas yang sudah tercapai dan belum tercapai dari sasaran strategis Kepala Daerah, sehingga dapat merumuskan strategi berikutnya agar sasaran strategis yang menjadi prioritas sesuai Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ini disusun untuk dijadikan bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten kedepan dan kiranya dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang, yang tujuan akhirnya adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Tutuyan, Maret 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,



SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos., M.Si.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

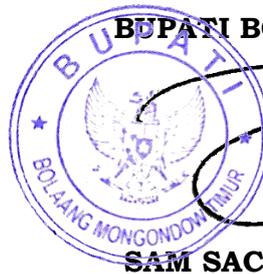
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

Pada Tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tutuyan, November 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,



SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA

KABUPATEN : BOLAANG MONGONDOW TIMUR

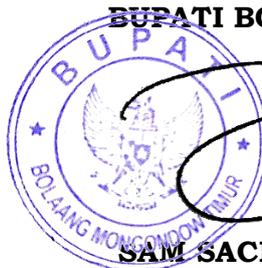
TAHUN : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan SDM	SAKIP	B
	Reformasi Birokrasi	B
	Opini BPK	WTP
	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Level 3
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,40
	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif
Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	Presentase deteksi dini konflik SARA Yang Diselesaikan	100%
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kunjungan Wisata	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan PDRB	4
	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	7,82
	Persentase kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	5,88
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,50 (50,35)
	Persentase jumlah penduduk yang berakses air minum	74,29
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	60,16
	Persentase rumah layak huni	85,86
	Persentase Terbentuknya Desa Tangguh Bencana	2 (40%)

	Indeks Desa Membangun	56,79
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	3,18
	Indeks Gini Ratio	0,34
	Tingkat pengangguran terbuka	6
	Persentase angka kemiskinan	5,6
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	68,29
Meningkanya Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat	Prevalensi Stunting	6
	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	10,90
	Harapan lama sekolah (Tahun)	11,63
	Angka Harapan Hidup (Tahun)	69,89
Meningkatkan Pelayanan Anak dan Kesetaraan Gender	Indeks pembangunan Gender (IPG)	90,95
	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	76,00

Tutuyan, November 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,



SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos., M.Si.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

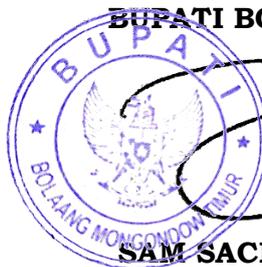
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

Pada Tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tutuyan, Januari 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,



SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA

KABUPATEN : BOLAANG MONGONDOW TIMUR

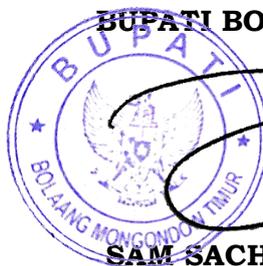
TAHUN : 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan SDM	SAKIP	A
	Reformasi Birokrasi	A
	Opini BPK	WTP
	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Level 3+
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,50
	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif
Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	Presentase deteksi dini konflik SARA Yang Diselesaikan	100%
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kunjungan Wisata	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan PDRB	4,5
	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	7,84
	Persentase kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	6,38
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,53
	Persentase jumlah penduduk yang berakses air minum	75,08
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	60,46
	Persentase rumah layak huni	86,42
	Persentase Terbentuknya Desa Tangguh Bencana	2
	Indeks Desa Membangun	72,84
Meningkatnya Kesejahteraan	Pertumbuhan Ekonomi	4%

Masyarakat	Indeks Gini Ratio	0,34
	Tingkat pengangguran terbuka	6
	Persentase angka kemiskinan	5,6
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	68,70
Meningkanya Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat	Prevalensi Stunting	6
	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	12,00
	Harapan lama sekolah (Tahun)	11,65
	Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,00
Meningkatkan Pelayanan Anak dan Kesetaraan Gender	Indeks pembangunan Gender (IPG)	91,00
	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	78,00

Tutuyan, Januari 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,



SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos., M.Si.

PENGUKURAN KINERJA

KABUPATEN : BOLAANG MONGONDOW TIMUR

TAHUN : 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	REALISASI	%
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan SDM	SAKIP	B	B	100%
	Reformasi Birokrasi	B	CC	97,15%
	Opini BPK	WTP	WTP*	100%
	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Level 3	Level 3	100%
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,40	2,46	102,50%
	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Kurang Inovatif	97,71%
Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial	Persentase deteksi dini konflik SARA Yang Diselesaikan	100%	100%	100%
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kunjungan	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan PDRB	4	1,81	45,25%

LKjIP TAHUN 2023

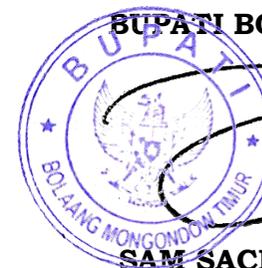
Wisata	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	7,82	17,27	220,84
	Persentase kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	5,88	7,13	121,26%
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,50	0,52	104%
	Persentase jumlah penduduk yang berakses air minum	74,29	72,74	97,91%
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	60,16	60,23	100,12%
	Persentase rumah layak huni	85,86	85,53	99,62%
	Persentase Terbentuknya Desa Tangguh Bencana	2	2 Desa (40%)	100%
	Indeks Desa Membangun	56,79	70,37	123,91%
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	3,18	5,35	168,24%
	Indeks Gini Ratio	0,34	0,324	104,71%
	Tingkat pengangguran terbuka	6	5,35	110,83%
	Persentase angka kemiskinan	5,6	5,80	96,43%
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	68,29	83,08	121,66%
Meningkanya Kualitas Kesehatan dan	Pervalensi Stunting	6	3,86	135,67%
	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	10,90	8,27	75,87%

LKjIP TAHUN 2023

Pendidikan Masyarakat	Harapan lama sekolah (Tahun)	11,63	11,90	102,32%
	Angka Harapan Hidup (Tahun)	69,89	68,51	98,03%
Meningkatkan Pelayanan Anak dan Kesetaraan Gender	Indeks pembangunan Gender (IPG)	90,95	91,22	100,30%
	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	76,00	70,10	92,24

Tutuyan, Maret 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,



SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos., M.Si.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Tutuyan II Kecamatan Tutuyan

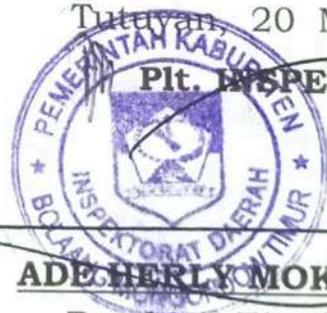
PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN 2023

Kami telah melakukan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2023 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan hasil reviu, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Tutuyan, 20 Maret 2024



Pt. INSPEKTUR

ADE HERLY MOKOGINTA, SH
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19841009 201001 1 011



VISI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

**TERWUDNYA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR YANG AMAN,
BERBUDAYA DAN SEJAHTERA MELALUI SINERGITAS PEMBANGUNAN PERDESAAN**

MISI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

- 1. MENINGKATKAN TATA KELOLAH PEMERINTAHAN YANG BAIK**
- 2. MENINGKATKAN BUDAYA DAN PARIWISATA YANG BERKEARIFAN LOKAL**
- 3. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN**